




DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN I (LKIP)

TAHUN
2026



Jl. Sorekarno Hatta No. Telp
(0474) 321423 Fax (0474) 321423 

KATA

PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025-2029 telah selesai.

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Triwulan I Tahun 2026 disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan dinamika Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sepanjang Triwulan I Tahun 2026 terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, kendala serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dapat tercapai sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025-2029 maupun RPJMD Tahun 2025-2029. Selain itu, Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Triwulan I Tahun 2026 juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, disamping itu juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya *good governance* di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

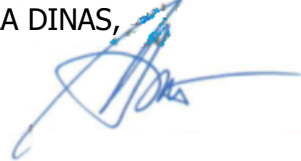
Menengah dan Perindustrian Triwulan I Tahun 2026.

Berkat dukungan dan kerja keras seluruh aparatur pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian secara umum target pembangunan sektor Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian telah berhasil dicapai, meskipun masih terdapat kendala yang menyebabkan target belum tercapai secara optimal.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Triwulan I Tahun 2026 masih dijumpai adanya kekurangan, namun diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang.

Akhir kata, saya selaku Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada seluruh aparatur pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang telah bekerja keras menyelesaikan Laporan Kinerja ini.

Malili, April 2026
KEPALA DINAS,



SENFY OKTOVIANUS, S.STP.MPA

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19751001 199612 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah	2
1.3 Sumber Daya Aparatur	7
1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah	8
1.5 Landasan Hukum	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029	13
2.2 Tujuan dan Rencana Strategis	14
2.3 Indikator Kinerja Utama	15
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2026	16
2.5 Rencana Anggaran Tahun 2026	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	19
3.2 Analisa Capaian Kinerja Organisasi	20
3.3 Analisa Efisiensi Sumber Daya	42
3.4 Analisa Sebab Keberhasilan/Kegagalan	45
3.5 Realisasi anggaran	126
BAB IV PENUTUP	135
4.1 Kesimpulan	135
4.2 Saran	136

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya **Good Governance** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, dan tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 85 Tahun 2021. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro kecil dan menengah;
- d. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
- e. Pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Dinas; dan;
- f. Pelayanan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai susunan organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 85 Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Perdagangan;
- d. Bidang Koperasi;
- e. Bidang UMKM;
- f. Bidang Perindustrian
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas dan kewajiban Kepala Dinas yaitu membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas Sekretariat adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1.1 Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
- 1.2 Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- 1.3 Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
- 1.4 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Bidang Perdagangan adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan kemetrolgian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan luar negeri;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemetrolgian; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Bidang Koperasi adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha dan pemberdayaan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan koperasi;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah, usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas. Sedangkan fungsinya adalah :

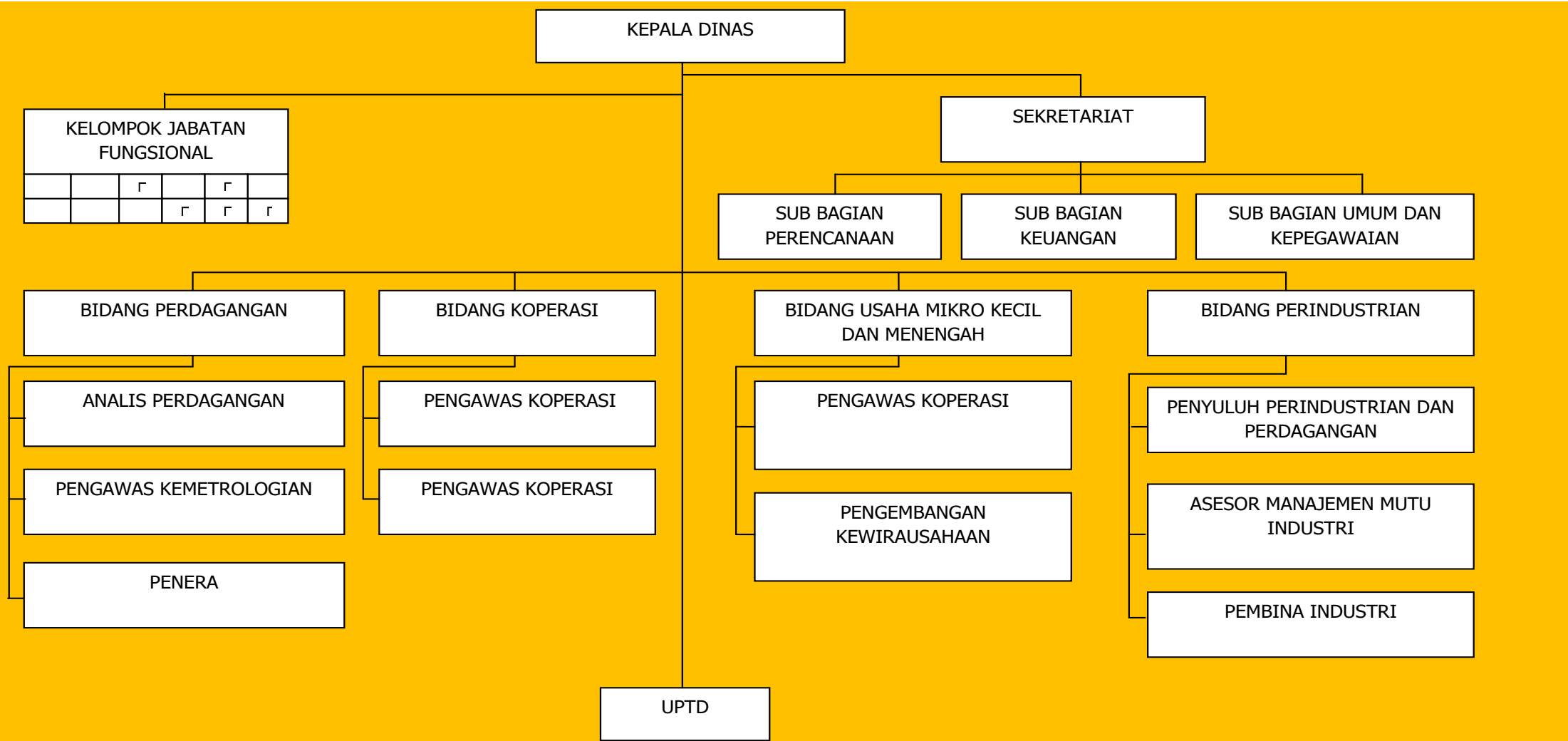
- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah;

- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Perindustrian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri, standarisasi dan perlindungan usaha industri, informasi dan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

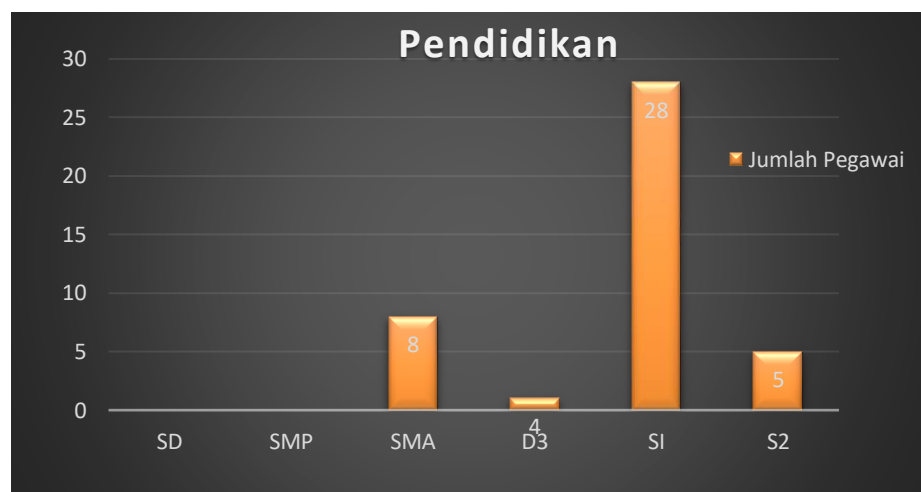
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang standarisasi dan perlindungan usaha industri;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.



1.3 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tahun 2025 sebanyak 42 ASN terdiri dari 21 ASN PNS dan 21 ASN PPPK . Keseluruhan Sumber Daya Manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :

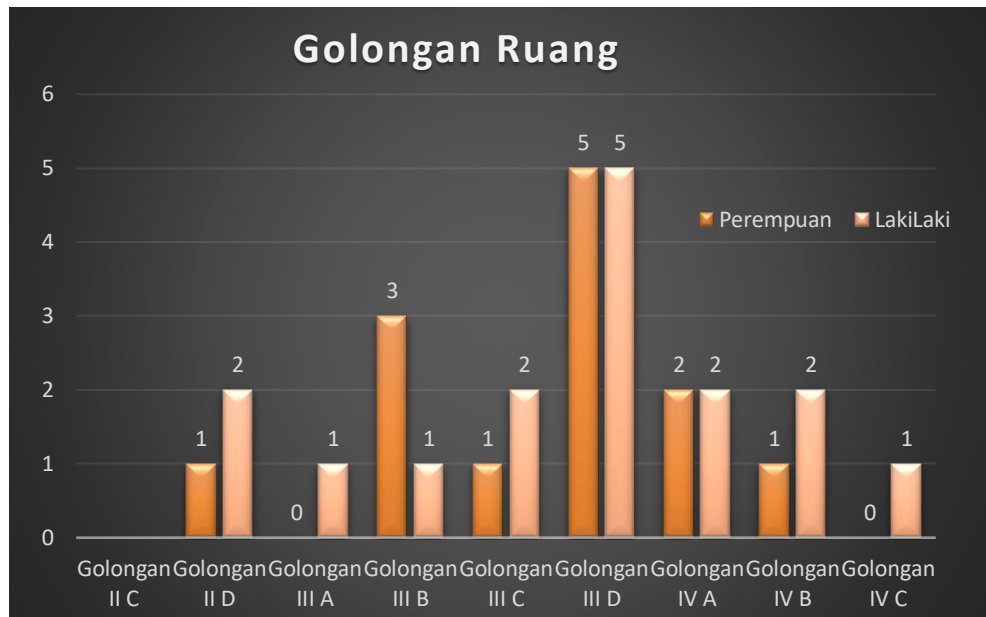


Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 (orang)

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdagkoprinum Kab. Luwu Timur

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sumber Daya Aparatur di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mayoritas ialah berpendidikan Strata 1 / Sarjana.

Berikut ini jumlah aparatur yang terdapat pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin.



Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 (orang)

Sumber : Sub Bagian Umum dan kepegawaian Disdagkoprinum Kab. Luwu Timur

1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat isu-isu strategis, antara lain:

Isu Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian :

- a. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :
 1. Belum optimalnya pemberdayaan UMKM.
 2. Belum optimalnya pendampingan dan akses pasar.
 3. Belum optimalnya izin usaha dan legalitas produk.
 4. Belum optimalnya digitalisasi dan transpormasi UMKM.
 5. Masih terbatasnya akses modal bagi UMKM.
 6. Kurangnya literasi digital dikalangan pelaku UMKM.
 7. Penilaian keaktifan bagi koperasi simpan pinjam (KSP) belum seluruhnya dilaksanakan.
 8. Belum optimalnya penyediaan data base UKM berpotensi yang dapat dipromosikan pada pasar luas

9. Belum optimalnya penguatan daya saing UMKM terhadap perkembangan industri di Kabupaten Luwu Timur yang telah ditunjang dengan data peran sektor industri dan sektor perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Kabupaten Luwu Timur yang cukup dominan.
 10. Sistem pengelolaan usaha ritel/toko koperasi yang masih tradisional serta banyaknya usaha ritel yang merajalela yang mempengaruhi usaha ritel koperasi.
 11. Belum optimalnya hasil promosi dan pameran produk-produk usaha UMKM.
 12. Belum maksimalnya kerja sama usaha koperasi yang mengelola hasil usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- b. Bidang Perdagangan :
1. Belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan dalam peningkatan PDRB.
 2. Belum optimalnya diversifikasi produk ekspor.
 3. Belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar daerah.
 4. Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi.
 5. Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera dan tera ulang UTTP yang dimiliki.
 6. Kurangnya sosialisasi perundang-undangan dan sosialisasi kemudahan Ekspor dan Impor.
- c. Bidang Perindustrian :
1. Belum optimalnya kontribusi industri perindustrian dalam peningkatan PDRB.
 2. Belum optimalnya diversifikasi industri non tambang.
 3. Masih rendahnya peningkatan infrastruktur industri pengelolaan.
 4. Masih rendahnya produktifitas IKM.
 5. Produk IKM belum menjadi daya tarik investasi.
 6. Belum terjalannya kerjasama IKM dengan dunia usaha dalam pemasaran produk IKM.
 7. Belum terpadunya lini kordinasi lintas OPD dalam pengembangan perindustrian dalam penanganan produk, pasar, promosi, dan investasi.

1.5 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 85 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

I.6 Sistematika Penulisan

Bab. I - Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah, sumber daya aparatur, permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, dasar hukum penyusunan LKIP dan sistematika penyajian LKIP.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2025 – 2029 (Renstra hasil revidi) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Triwulan I Tahun 2026, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I Tahun 2026, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Sesuai dengan RPJMD Kab.Luwu Timur Tahun 2025-2029, strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

VISI

“ Luwu Timur Maju dan Sejahterah”

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melaksanakan ***misi ke-2 (dua) dan misi ke-5 (lima)*** dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

MISI II

“Meningkatkan daya saing untuk pertumbuhan berkualitas ”

MISI V

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital”

Merupakan visi yang menjadi amanat bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur untuk menciptakan ***“Perekonomian yang Berdaya Saing dan berkualitas”***.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan

berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 : "Luwu Timur Maju dan Sejahterah"		
Misi II : "Meningkatkan daya saing Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas "		
NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri	Meningkatnya kontribusi sektor Koperasi dan sektor usaha mikro, kecil dan menengah

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 : "Luwu Timur Maju dan Sejahterah"		
Misi V : "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transpormasi digital "		
NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Meningkatnya pertumbuhan sektor industri

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama. Dimana setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur terhadap capaian kinerja yang dilakukan.

Tabel 2.2 Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan industri	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan sektor usaha mikro, kecil dan menengah.	- Persentase pertumbuhan omzet UMKM - Persentase koperasi sehat
		Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	- Pertumbuhan omzet perdagangan - Pertumbuhan nilai ekspor perdagangan - Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah

2.4 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2026

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Triwulan I Tahun 2026 pada Dokumen Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026.

2.5 RENCANA ANGGARAN DISDAGKOPRINUM TAHUN 2026

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama telah ditetapkan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur untuk belanja sebesar **Rp. 34.252.676.073-** (*Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).

Adapun anggaran tersebut dirinci berdasarkan program, secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Pagu Anggaran Tahun 2026

No	Program	Pagu Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.328.341.890,-
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 29.825.220,-
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 167.911.000,-
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 84.684.250,-
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 1.580.932.600,-
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 39.255.800,-
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 1.512.360.400,-
8	Program Pengembangan UMKM	Rp. 228.719.200,-
9	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 35.910.000,-
10	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 20.935.046.000,-
11	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 651.210.200,-
11	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 294.445.500,-
13	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 204.919.113,-
14	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Rp. 2.025.851.900,-
15	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 65.183.000,-
16	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri	Rp. 68.080.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan , badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai dengan diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Triwulan I Tahun 2026 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan selama. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029. Sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026, seluruh jajaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dapat diilustrasikan dalam gambar diagram batang berikut ini :

Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut

Tabel 3.1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia. Pada sasaran ini penilaian masih menggunakan indikator kinerja renstra 2021-2025.

Tabel. 1
Capaian Kinerja I Triwulan I Tahun 2025
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kopersi dan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Manengah	Persentase Pertumbuhan Omzet UMKM	11,707%	%	%

1.1 Capaian Sasaran Strategis 1 :

Sasaran Strategis Pertama yaitu Meningkatkan Kontribusi Sektor Kopersi dan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Manengah variabel pengukuran dalam meningkatnya pertumbuhan omzet UMKM yaitu mencakup pengukuran yaitu :

1. Indikator Kinerja I

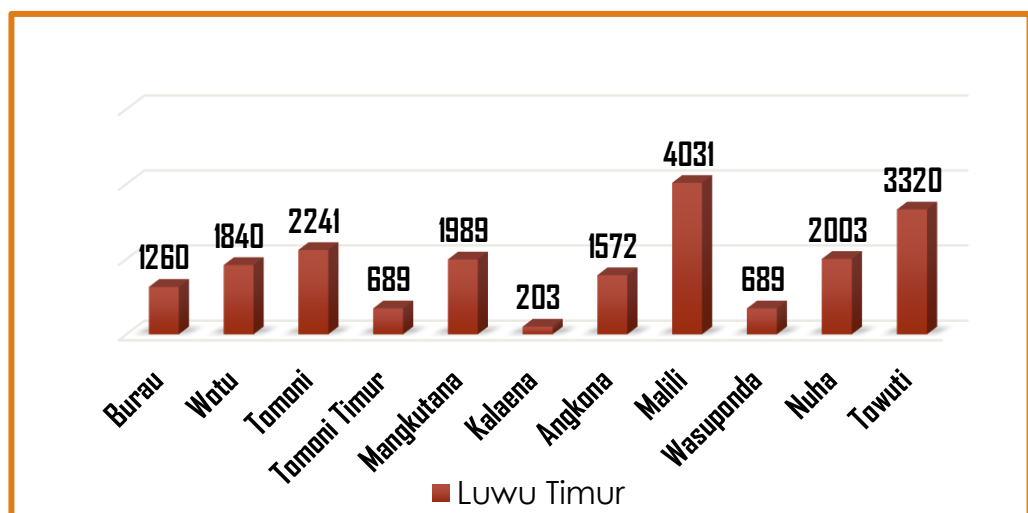
a. Persentase Pertumbuhan Omzet UMKM

Sasaran kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian pada tahun 2026 diarahkan pada peningkatan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB), dengan indikator kinerja adalah Pertumbuhan Omzet UMKM. Target pertumbuhan omzet UMKM ditetapkan 11,7% dan diharapkan dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun anggaran atau Triwulan IV tahun 2026, setelah seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara menyeluruh.

Upaya pencapaian target tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM dan Program Pengembangan UMKM yang difokuskan pada peningkatan kapasitas usaha, produktivitas, serta akses pasar bagi pelaku UMKM. Intervensi yang dilakukan meliputi kegiatan pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, fasilitas legalitas, serta penguatan akses pembiayaan dan pemasaran produk.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan secara terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan terjadi peningkatan omzet UMKM yang signifikan, khususnya pada pelaku usaha mikro dan kecil yang meliputi sasaran utama pembinaan dengan jumlah UMKM Kabupaten Luwu Timur sebanyak 19.828 UMKM yang bergerak di industri olahan pangan dan makanan yang tersebar di 11 kecamatan.

SEBARAN UMKM di KAB. Luwu Timur



(sumber data :Data Bidang UMKM Tahun 2026)

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Omzet UMKM

- **Persentase Pertumbuhan Omzet UMKM**
- **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Tabel. 2
Realisasi Indikator Sasaran I Triwulan I Tahun 2026
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Koperasi dan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Manengah	Persentase Pertumbuhan Omzet UMKM	-%	-%	-%

Penjelasan:

Pencapaian oleh indikator kinerja utama ke-1 bidang UMKM kaitannya dengan persentase pertumbuhan omzet UMKM. Tahun 2026 berdasarkan rencana aksi yang ditetapkan pada triwulan IV untuk pertumbuhan omzet UMKM sebesar 11,707%. Realisasi pertumbuhan Omzet UMKM jadi untuk mengethuinya dapat dihitung diakhir tahun, untuk menghitungnya menggunakan formula:

$$\begin{aligned} & \text{Rata-Rata Omzet Periode Tahun INI} - \text{Rata-Rata Omzet Periode Lalu} \\ & \text{dibagi Rata-Rata Omzet Periode Lalu} \times 100\% \\ & = \quad / \quad \times 100\% \\ & = \end{aligned}$$

- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun 2025

Tabel. 3
Realisasi Indikator Sasaran I Tahun 2026
(dibandingkan realisasi Tahun 2025)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2026	Realisasi TW I Tahun 2025
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Koperasi dan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Manengah	Persentase Pertumbuhan Omzet UMKM	-%	-%

Penjelasan:

Dibandingkan dengan tahun 2025, pertumbuhan Omzet UMKM ditahun 2026 pada periode yang sama belum bisa dihitung karena pelaksanaan kegiatan sementara berjalan sehingga indikato pengukuran belum bisa dilaksanakan.

- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2026 dengan Target Akhir Renstra

Tabel. 4
Realisasi Indikator Sasaran I Tahun 2026
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2026	Target Akhir Renstra Tahun 2029
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Koperasi dan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Manengah	Persentase Pertumbuhan Omzet UMKM	-%	14,337%

Penjelasan:

Dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2029 dengan pertumbuhan Omzet UMKM sebesar 0%, maka realisasi yang diperoleh tahun 2026 sebesar 0% sudah melampaui target diakhir renstra.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2026 dengan Realisasi Secara Nasional (terhadap PDB)**

Tabel. 5
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025
(dibandingkan target secara nasional)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2026	Realisasi Nasional terhadap PDB
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kopersi dan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Manengah	Persentase Pertumbuhan Omzet UMKM	-%	-%

Penjelasan:

Secara nasional Pertumbuhan Omzet UMKM terhadap PDB secara nasional sebesar 0% sedangkan capaian Kab. Luwu Timur Pertumbuhan Omzet UMKM kab. Luwu Timur berkisar 0% tahun 2026.

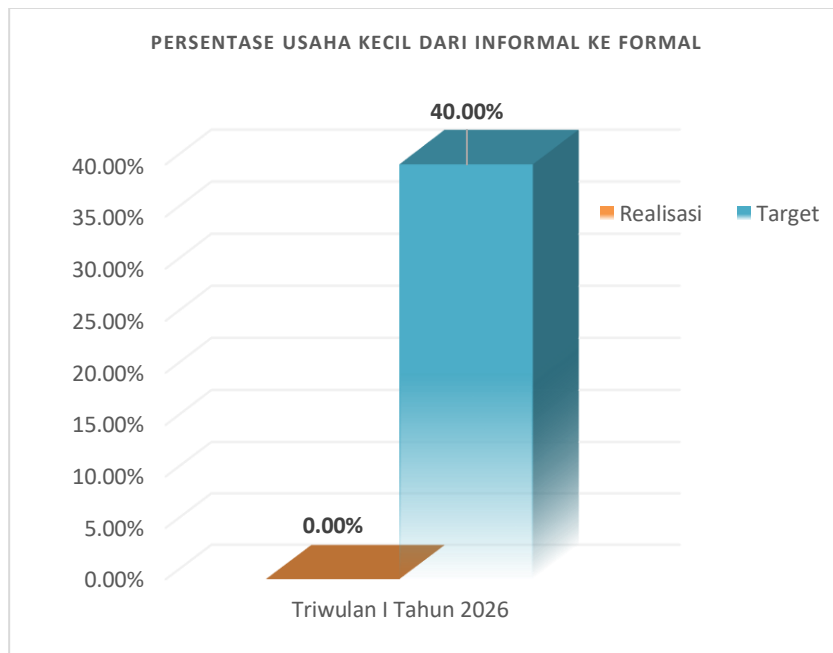
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 untuk indikator Pertumbuhan Omzet UMKM :

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Target kinerja yang ditetapkan pada program ini yaitu :Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari Informal menjadi Formal 40%. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

$$\begin{aligned} & \text{(Usaha Mikro Memperoleh NIB / Jumlah UMKM Sektor Industri} \\ & \text{x100\%)} \\ & = \quad / \quad \text{x 100\%} \\ & = \quad \% \end{aligned}$$

Realisasi indikator kinerja pada tahun 2026 sebesar 0% terhadap target sebesar 0% (capaian 0%). Dikarenakan rencana aksi pada triwulan IV.



1) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya wirausaha baru dengan indikator kinerja “ Persentase Usaha Mikro menjadi wirausaha. Untuk mengukur capaian indikator kinerja pada kegiatan tersebut adalah dengan menggunakan formula :

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah wirausaha baru yang diinput keODS dibagi Target WUB} \\ & \text{yang diinput ke ODS x 100\%} \\ & = \quad / \quad \times 100 \\ & = \quad \% \end{aligned}$$

Realisasi indikator kinerja pada triwulan I tahun 2026 karena rencana aksi ditetapkan pada triwulan IV untuk kegiatan tersebut adalah 0 terhadap target 0 WUB (Capaian 0%). **Predikat kinerja sangat me.**

a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kenitraan Usaha Mikro

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah tersedianya data unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro dengan indikator Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro. Untuk mengukur capaian indikator kinerja menggunakan formula:

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah usaha mikro yang diinput ke ODS pada triwulan (n)} \\ & \text{tahun-n)} \\ & = \text{usaha mikro} \end{aligned}$$

Berdasarkan penetapan target kinerja pada sub kegiatan ini ditargetkan di triwulan II sebanyak 30 Unit usaha.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Sasaran sub kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro. Untuk mengukur indikator dari sub kegiatan yang dimaksud yaitu dengan menggunakan formula :

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan} \\ & \text{fasilitasi pendampingan pada triwulan (n) tahun-n)} \\ & = \text{UMKM} \end{aligned}$$

Sub kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro ditetapkan pada triwulan III tahun 2026.

c. Sub Kegiatan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil

Sasaran sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya perolehan hak kekayaan intelektual usaha kecil atau pengakuan terhadap produk yang dihasilkan. Untuk mengukur indikator dari sub kegiatan ini menggunakan formula :

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah usaha mikro dan kecil yang difasilitasi pengurusan} \\ & \text{Merek pada triwulan (n) tahun-n)} \\ & = \text{UMKM} \end{aligned}$$

Berdasarkan penetapan target pada rencana aksi sub kegiatan tersebut ditergetkan pada triwulan III tahun 2026.

d. Sub Kegiatan Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro

Sasaran dari sub kegiatan tersebut adalah terfasilitasinya usaha mikro dan kecil untuk standarisasi dan sertifikasi produk usaha. Indikator dari kegiatan tersebut adalah jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha. Menurut UU No.33 Tahun 2014 khususnya prosedur fasilitasi sistem jaminan halal, dimana semua permohonan pendaftaran Sistem Jaminan Halal harus melalui

aplikasi SiHalal BPJPH Kementerian Agama untuk penerbitan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) sebagai syarat audit pihak LPPOM MUI. Untuk mengukur capaian indikator. Untuk mengukur indikator dari sub kegiatan ini menggunakan formula :

(Jumlah usaha mikro dan kecil yang difasilitasi pengurusan Halal pada triwulan (n) tahun-n)
= UMKM

Berdasarkan penetapan target pada pada rencana aksi sub kegiatan tersebut ditergetkan pada triwulan III tahun 2026

e. Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya data usaha mikro yang valid dengan indikator kinerja “ jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data sistem (ODS). Untuk mengukur capaian indikator kinerja menggunakan formula :

(Jumlah usaha mikro yang diinput ke ODS pada triwulan (n) tahun-n)
= 42 usaha mikro

Berdasarkan penetapan target kinerja tahun 2026 untuk sub kegiatan tersebut diperoleh realisasi sebanyak 42 usaha mikro dari target 42 usaha mikro dengan capaian 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

f. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

Sasaran sub kegiatan yaitu terfasilitasinya usaha mikro untuk peningkatan pemahaman dan pengetahuan serta kompetensi SDM UMKM dengan indikator kinerja jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan kompetensi SDM. Untuk mengukur indikator tersebut dengan menggunakan formula :

(Jumlah usaha mikro yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pada triwulan (n) tahun-n)
= UMKM

Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan penetapan target kinerja pada rencana aksi ditargetkan di triwulan I tahun 2026.

2. Program Pengembangan UMKM

Target kinerja yang ditetapkan pada program Pengembangan UMKM adalah 10,76% Proporsi UMKM yang menjalin kemitraan dan ekspor akan terealisasi pada akhir tahun atau triwulan IV tahun 2026. Untuk mengukur indikator tersebut dengan menggunakan formula :

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah UMKM Mwnjalin Kemitraan + Ekspor dibagi Jumlah} \\ & \text{UMKM Sektor Industri x 100\%} \\ & = \quad / \quad \times 100\% \\ & = \quad \% \end{aligned}$$

Sesuai dengan rencana aksi tahunan target kinerja untuk program pengembangan UMKM ditargetkan diakhir tahun atau triwulan IV.

1) Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas dengan indikator kinerja “persentase peningkatan skala usaha mikro”. Untuk mengukur capaian indikator kegiatan menggunakan formula :

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah usaha mikro Yang Naik Kelas} \\ & = \quad \text{UMKM} \end{aligned}$$

Sesuai dengan rencana aksi tahunan target kinerja untuk kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil di target sesuai rencana aksi pada triwulan IV.

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inkubasi secara Terpadu dan Berjenjang.

Sasaran dari sub kegiatan tersebut adalah terfasilitasinya usaha mikro untuk membentuk wadah dalam menjalankan sistem usaha agar terpusat pada kegiatan pelatihan, produksi, pengemasan sampai penjualan. Untuk mengukur capaian indikator, dengan menggunakan formula :

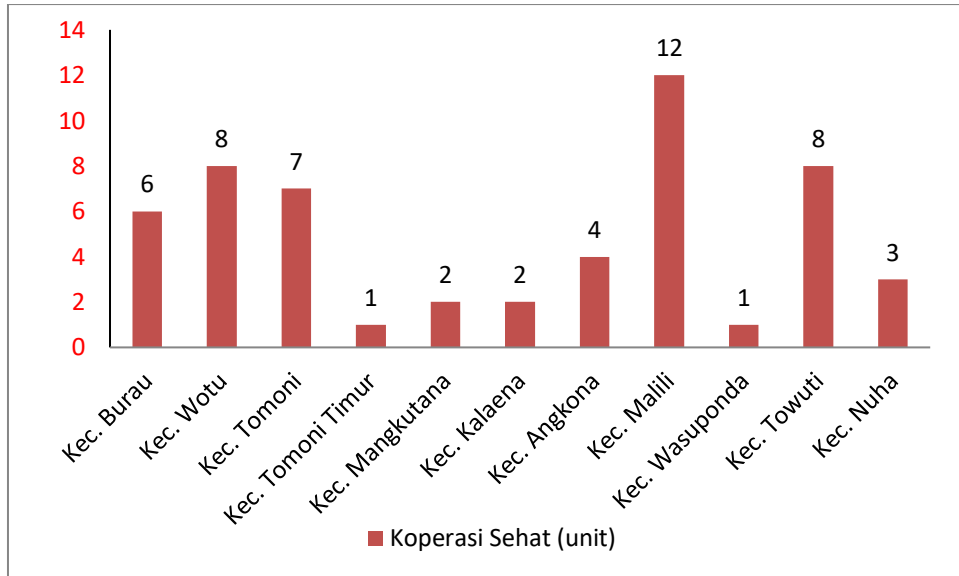
(Jumlah lembaga
= lembaga

Sesuai dengan rencana aksi Target pencapaian kinerja Realisasi kinerja pada sub kegiatan Fasilitasi pengembangan inkubasi secara terpadu dan berjenjang ditergetkan pada triwulan III tahun 2026

2. Indikator Kinerja II

a. Persentase Koperasi Sehat

Sasaran Indikator Persentase Koperasi Sehat dapat diukur dengan menghitung jumlah koperasi yang meningkat status kinerjanya untuk mengukur peningkatan status kinerja koperasi meliputi 7 indikator yaitu Permodalan, Kualitas aktiva lancar, Manajemen umum, Manajemen kelembagaan, Manajemen permodalan, Manajemen aktiva, Manajemen likuiditas (kemampuan koperasi membayar utang jangka pendek) dan Earning (partisipasi anggota. Penilaian indikator kinerja masih menggunakan Renstra tahun 2025-2029. Adapun jumlah koperasi sehat yang ada sebanyak 54 koperasi dapat dilihat pada dibawa ini:



3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Koperasi Sehat

- **Persentase Koperasi Sehat**
- **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Tabel. 6
Realisasi Indikator Sasaran II Tahun 2026
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan sektor usaha mikro, kecil dan menengah	Persentase Koperasi Sehat	-%	-%	- %

Penjelasan:

Pencapaian sasaran indikator ini dengan meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas dihitung dengan menghitung jumlah koperasi yang meningkat status kinerjanya terhadap jumlah koperasi dengan menggunakan formula:

$$\begin{aligned}
 & \text{(Jumlah koperasi sehat pada triwulan n- tahun -n dibagi jumlah keseluruhan koperasi) } \times 100\% \\
 & = \quad / \quad \times 100\% \\
 & = \quad \%
 \end{aligned}$$

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW 1 Tahun 2026 dengan TW 1 Tahun 2025**

Tabel. 7
Realisasi Indikator Sasaran II Tahun 2026
(dibandingkan realisasi Tahun 2025)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Realisasi TW 1 Tahun 2026	Realisasi TW 1 Tahun 2025
1.	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan sektor usaha mikro, kecil dan menengah	Persentase Koperasi Sehat	-%	-%

Penjelasan:

Triwulan I Tahun 2026, persentase koperasi sehat belum dapat dihitung mengingat pembinaan dan pengawasan baru dimulai sehingga hasilnya belum bisa dihitung pada triwulan I tahun 2026.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2026 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 8
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2026
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2026	Target Akhir Renstra Tahun 2029
1.	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan sektor usaha mikro, kecil dan menengah	Persentase koperasi sehat	-%	15%

Penjelasan:

Dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2029 persentase koperasi sehat sebesar 15%.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2026 dengan Realisasi Secara Nasional**

Tabel. 9
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2026
(dibandingkan realisasi secara nasional)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2026	Realisasi secara nasional
1.	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan sektor usaha mikro, kecil dan menengah	Persentase Koperasi sehat	-%	-%

(sumber data : Laporan ODS KemenkopUKM periode s/Maret 2026)

Penjelasan:

Berdasarkan data ODS Kementerian Koperasi R.I Jumlah koperasi sehat yang ada secara angka nasional di tahun 2026 belum dirilis oleh BPS sehingga menggunakan data tahun 2025, adapun jumlah koperasi sehat sebesar 222.462 koperasi.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 untuk indikator Persentase Koperasi sehat :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Sasaran program adalah peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam . Formul yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah :

$$\begin{aligned} & \text{(jumlah koperasi yang difasilitasi pelayanan Izin Usaha Simpan} \\ & \text{Pinjam dibagi jumlah koperasi KSP/USP)} \\ & = \frac{\quad}{\quad} \times 100\% \\ & = \quad \% \end{aligned}$$

Realisasi untuk program Pelayanan Izin usaha Simpan Pinjam baru bisa dihitung pada akhir tahun atau triwulan IV tahun 2026 dari target yang direncanakan sebesar 14,72%.

1). Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Kota

Sasaran kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dilengkapi dengan indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah koperasi yang difasilitasi izin usaha simpan pinjam. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerjanya adalah:

$$\begin{aligned} & \text{(jumlah koperasi yang diterbitkan Izin Usaha Simpan Pinjam di} \\ & \text{bagi jumlah Koperasi KSP/USP)} \\ & = \quad / \quad \times 100\% \\ & = \quad \% \end{aligned}$$

Sesuai rencana aksi yang ditetapkan target kinerja untuk kegiatan ini sebesar 14,49% direncanakan pada triwulan IV tahun 2026.

a. Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Kabupaten/Kota

Sasaran sub kegiatan yaitu jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten/kota. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah :

$$\begin{aligned} & \text{(jumlah koperasi yang difasilitasi pemenuhan Izin Usaha Simpan} \\ & \text{Pinjam pada triwun (n) tahun berjalan)} \\ & = \quad \text{Koperasi} \end{aligned}$$

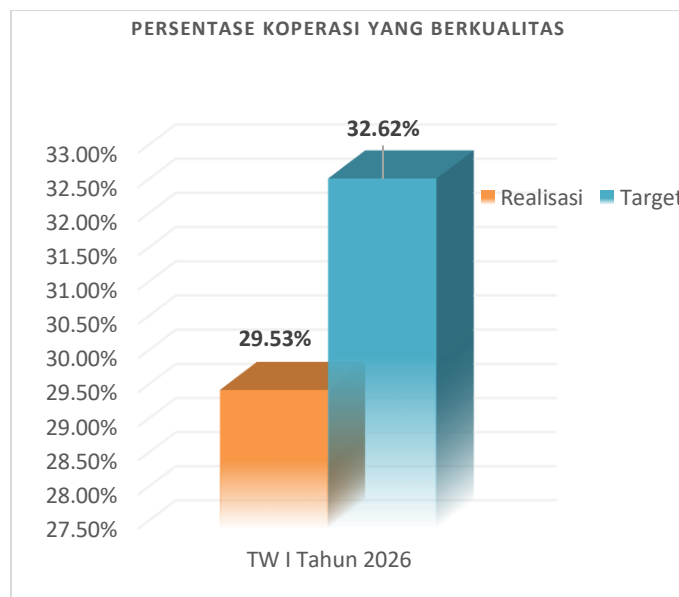
Target dari sub kegiatan ini adalah 59 koperasi dengan rencana aksi pada triwulan IV tahun 2026.

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Sasaran program “Meningkatnya Koperasi yang berkualitas” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase koperasi yang berkualitas yang diukur dengan formula:

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT,} \\ & \text{volume usaha dan asset pada triwulan (n) tahun berjalan) dibagi} \\ & \text{Jumlah keseluruhan koperasi pada tahun berjalan) x 100\%} \\ & = 57/193 \times 100\% \\ & = 29,53\% \end{aligned}$$

Target yang ditetapkan untuk program pengawasan dan pemeriksaan koperasi pada triwulan I adalah 32,62% koperasi yang berkualitas dan realisasi sebesar 29,53% (57 Koperasi dari total koperasi 193 koperasi. Sehingga capaian kinerja bidang koperasi melalui program pengawasan dan pemeriksaan koperasi untuk TW I (persentase capaian 90,52%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**



1) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Kegiatan adalah untuk meningkatnya jumlah koperasi aktif. Sehingga Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk

koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota yang menjadi indikator kegiatan tersebut dapat dihitung dengan formula:

$$\begin{aligned} & (\text{Jumlah koperasi yang dilakukan oleh pengawasan, kekuatan,} \\ & \text{kesehatan dan kemandirian pada triwulan (n) tahun berjalan}) \\ & \text{dibagi Jumlah keseluruhan koperasi pada tahun berjalan) } \times 100\% \\ & = 41/193 \times 100\% \\ & = 21,24\% \end{aligned}$$

Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk triwulan I Tahun 2026 sebesar 21,24% dari target 20,17% (persen capaian 105,30%).
Predikat kinerja sangat memuaskan.

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran dari sub kegiatan adalah terlaksananya pengawasan dan pembinaan koperasi. Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi yang merupakan indikator dari kegiatan tersebut dapat dihitung dengan dengan formula :

$$\begin{aligned} & (\text{Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan, kekuatan,} \\ & \text{kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi} \\ & \text{pada triwulan (n) tahun berjalan} \\ & = 41 \text{ koperasi} \end{aligned}$$

Realisasi terhadap target untuk sub kegiatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota pada triwulan I Tahun 2026 sebanyak 41 koperasi dari target 37 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 110,81%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Sasaran program "Meningkatnya kesehatan koperasi KSP/USP" dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase koperasi sehat yang diukur dengan formula:

$$\begin{aligned} & (\text{Jumlah koperasi sehat pada tahun berjalan}) \text{ dibagi Jumlah} \\ & \text{keseluruhan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam (KSP/USP)} \\ & \text{pada triwulan (n) tahun berjalan) } \times 100\% \\ & = \quad / \quad \times 100\% \\ & = \quad \% \end{aligned}$$

Sesuai Rencana Aksi yang ditetapkan target kinerja untuk program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi ditetapkan pada triwulan III.

1) Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran dari kegiatan adalah meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya merupakan indikator dari kegiatan tersebut yang dapat diukur dengan menggunakan formula :

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya pada tahun berjalan} \\ & \text{dibagi jumlah keseluruhan koperasi simpan pinjam/unit simpan} \\ & \text{pinjam (KSP/USP) pada tahun berjalan)} \times 100\% \\ & = \quad / \quad \times 100\% \\ & = \quad \% \end{aligned}$$

Sesuai Rencana Aksi yang ditetapkan target kinerja untuk kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Sesuai Rencana Aksi yang ditetapkan target kinerja pada triwulan III.

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sasaran dari sub kegiatan adalah terlaksananya bimtek penilaian kesehatan koperasi KSP/USP, dengan indikator jumlah koperasi yang mengikuti penilaian kesehatan KSP/USP. Pencapaian sub kegiatan dijabarkan melalui formula dibawah:

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah koperasi yang mengikuti penilaian kesehatan KSP/USP} \\ & \text{pada tahun n-)} \\ & = - \end{aligned}$$

Sesuai Rencana Aksi yang ditetapkan telah terealisasi pada triwulan I tahun 2026 untuk sub kegiatan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota ditetapkan pada Triwulan III.

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

Sasaran program adalah meningkatnya koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha dengan profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan, indikator yang ditetapkan berdasarkan rencana strategis 2025-2029 yaitu persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan. Untuk mengukur indikator menggunakan formula :

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah koperasi yang manajemen pengelolaannya meningkat} \\ & \text{melalui pelatihan pada tahun berjalan dibagi jumlah koperasi} \\ & \text{aktif pada tahun berjalan)} \times 100\% \\ & = - \end{aligned}$$

Realisasi indikator untuk program pendidikan dan latihan perkoperasian ditargetkan pada triwulan II tahun 2026 sesuai rencana aksi.

1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/kota

Sasaran kegiatan "Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang koperasi" dilengkapi satu indikator kinerja kegiatan yaitu persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota yang diukur dengan menggunakan formula :

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan} \\ & \text{triwulan (n) tahun berjalan dibagi jumlah koperasi aktif)} \times 100\% \\ & = \quad / \quad \times 100\% \\ & = \quad \% \end{aligned}$$

Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk Triwulan I tahun 2026 di target di triwulan II tahun 2026 sesuai dengan rencana aksi.

a. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pelatihan manajemen dan audit koperasi. Indikator dari sub kegiatan tersebut adalah jumlah koperasi aktif yang ditingkatkan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah :

(Jumlah koperasi aktif yang ditingkatkan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi pada triwulan (n) tahun berjalan)
= koperasi

Realisasi indikator dari sub kegiatan Triwulan I Tahun 2026 belum ada karena ditargetkan ditriwulan II tahun 2026 berdasarkan rencana aksi.

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Sasaran program adalah meningkatnya koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi Formula yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja yaitu:

(Jumlah koperasi yang diberdayakan melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan pada tahun berjalan dibagi Jumlah koperasi aktif pada tahun berjalan) x 100%
= / x 100%
= %

Realisasi kinerja pada program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan target kinerja 3 ,15%%. Berdasarkan rencana aksi program ini baru aka dilaksnakan pada triwulan IV tahun 2026.

1) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan “Meningkatnya jumlah koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan koperasi” dilengkapi satu indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan strukturisasi usaha yang diukur dengan menggunakan formula :

(Jumlah koperasi yang difasilitasi akses pembiayaan dan akses pasar dibagi jumlah koperasi aktif)x 100%)
= / x 100%
= %

Target kinerja untuk program pemberdayaan dan perlindungan koperasi ditargetkan ditriwulan IV tahun 2026 sesuai dengan rencana aksi.

a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sasaran sub kegiatan yaitu meningkatnya jumlah koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Indikator sub kegiatan tersebut adalah jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan. penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi koperasi kewenangan kabupaten/kota. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah :

(jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan. penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi koperasi pada triwun (n) tahun berjalan)
= -

Pencapaian kinerja untuk sub kegiatan tersebut pada rencana aksi ditargetkann pada triwulan IV tahun 2026.

III.3.1 Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD untuk tahun 2026 dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis I terdiri dari 7 program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 213.735.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 131.656.000,- sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar **61,60%**. Dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar **90,52%**, sehingga dapat disimpulkan pada sasaran ini terjadi inefisiensi Anggaran sebesar **28,92%**.

Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk Sasaran Strategis I
Tahun 2026

Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2026	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	Predikat Kinerja
Meningkatnya Kontribusi Sektor Koperasi dan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertranspormasi dari Infomal Ke Fomal	40%	%	%	Rp. 49.873.000	3,30 %	Capaian kinerja ditargetkan di TW IV
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro menjadi wira usaha	9%	%	%	Rp. 49.873.000	3,30%	Capaian kinerja ditargetkan di TW IV
	Sub Kegiatan Pemberdayaa melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	11 unit Usaha	- unit usaha	-%	Rp. 4.160.000	13,00%	Capaian kinerja ditargetkan di TW II
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	11 unit usaha	- unit usaha	-%	Rp. 44.363.000	5,66%	Capaian kinerja ditargetkan di TW III
	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak	Jumlah Usaha Mikro	25 unit usaha	- unit usaha	%	Rp. -	-%	Capaian kinerja

	Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	yang Terfasilitasi	usaha	usaha				ditargetkan di TW III
	Sub kegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	25 unit usaha	- unit usaha	-%	Rp.		Capaian kinerja ditargetkan di TW III
	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	42 unit usaha	42 unit usaha	100%	Rp. 1.350.000	2,39%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	80 orang	Orang	-%			Capaian kinerja ditargetkan di TW II
	Program Pengembangan UMKM	Proporsi UMKM Menjalain Kemitraan dan Ekspor	10,76%	-%	-%	Rp. -	-%	Capaian kinerja ditargetkan di TW IV
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang Berkualitas	21%	-%	-%	Rp. -	-%	Capaian kinerja ditargetkan di TW IV
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Unkubator yang Terfasilitasi	1 lembaga	- lembaga	-%	Rp. -	-%	Capaian kinerja ditargetkan di TW IV
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang	14,72%	%	-%	Rp.	-%	Capaian kinerja ditargetkan di TW

		Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam						IV
	Kegiatan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen keragaan Koperasi Simpan Pinjam	1 dokumen	..dokumen	-%	Rp.-	-%	Capaian kinerja ditargetkan di TW IV
	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	59 unit usaha	Unit usaha	-%	Rp.	%	Capaian kinerja ditargetkan di TW IV
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	32,62%	29,53%	90,52%	Rp. 10.925.000	6,51%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	20,17%	21,24%	105,30%	Rp. 10.925.000	6,51%	Sangat Memuaskan

	Sub Kegiatan Pelaksanaan proses Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan	37 unit usaha	41 unit usaha	110%	Rp. 10.925.000	6,51%	Sangat Memuaskan
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi aktif	38,24%	-%	-%	Rp. -	-%	Capaian kinerja ditargetkan di TW III
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	38,24%	-%	-%	Rp. -	-%	Capaian kinerja ditargetkan di TW III
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah unit usah koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	15 Unit usaha	- unit usaha	-%	Rp. -	-%	Capaian kinerja ditargetkan di TW III
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	10,71%	-%	-%	Rp. 5.030.000	0,32%	Capaian kinerja ditargetkan di TW II
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan	Persentase Koperasi yang	16,34%	-%	-%	Rp.	-%	Capaian kinerja ditargetkan

	Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/kota	Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota						an di TW II
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	15 orang	-orang	-%	Rp.	-%	Capaian kinerja ditargetkan di TW II
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi berkualitas	3,15%	-%	-%	Rp. -	-%	Capaian kinerja ditargetkan di TW IV
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan strukturisasi usaha	5,64%	-%	-%	Rp. -	-%	Capaian kinerja ditargetkan di TW IV
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses	Jumlah koperasi yang diberdayakan dan Peningkatan Produktifitas,	20 unit usaha	-Unit usaha	-%	Rp. -	-%	Capaian kinerja ditargetkan di TW IV

	Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota						
--	---	--	--	--	--	--	--	--

III.1.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Program pemberdayaan UMKM dan Pengembangan UMKM merupakan program yang berkontribusi ke penanggulangan kemiskinan. Triwulan I tahun 2026 telah terdata sebanyak 42 UMKM dan terinfut ke dalam sistem ODS. Pendataan UMKM yang dilakukan secara kontinu setiap triwulan untuk mengukur sejauh mana data yang dihimpun dan diperbaharui secara akurat dan valid sehingga akan membantu perencanaan pengambilan keputusan pada sektor UMKM. Sementara untuk pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro capaian kinerja ditargetkan ditriwulan III.
- b. Program pengembangan UMKM dengan indikator proporsi UMKM menjalin kemitraan dan Ekspor untuk capaian kinerja ditetapkan ditriwulan III. Pada program ini merupakan program yang memfasilitasi bagi pelaku usaha dalam pemenuhan dan peningkatan daya saing produk dan pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kemampuan UMKM
- c. Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan indikator persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi telah dilaksanakan sebanyak 41 koperasi dilaksanakan pengawasan. Ini dilaksanakan secara ritin untuk mengetahui perkembangan dan kondisi koperasi.

1.2 Capaian Sasaran Strategis 2 :

Sasaran Strategis Kedua yaitu meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB. Variabel pengukuran dalam meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB didukung oleh 2 (dua) variabel pengukuran yaitu :

2. Indikator Kinerja I

a. Pertumbuhan Omzet Perdagangan

Pertumbuhan Omzet Perdagangan sebesar 10% ditargetkan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan dan berdasarkan hasil Laporan BPS yang dirilis pada akhir tahun. Penilaian indikator kinerja masih menggunakan Renstra tahun 2025-2029.

3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Pertumbuhan Omzet Perdagangan

▪ Pertumbuhan Omzet Perdagangan

Tabel. 11
Realisasi Indikator Sasaran II Tahun 2026
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Pertumbuhan Omzet Perdagangan	10%	-%	-%

Penjelasan:

Pertumbuhan Omzet Perdagangan akan diukur pencapaian kinerja berdasarkan rencana aksi dan laporan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun TW. IV Tahun 2025**

Tabel. 12
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2026
(dibandingkan realisasi Tahun 2025)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Tahun 2025
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Pertumbuhan Omzet Perdagangan	-%	-%

Penjelasan:

Pencapaian sasaran strategis 2 ditunjukkan dengan belum adanya realisasi sampai akhir triwulan 2 karena pada target rencana aksi ditetapkan pada triwulan IV.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2026 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 13
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2026
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. I Tahun 2026	Target Akhir Renstra Tahun 2029
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Pertumbuhan Omzet Perdagangan	-%	15%

Penjelasan:

Dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2029 dengan pertumbuhan Omzet Perdagangan sebesar 10%, maka realisasi yang diperoleh di tahun 2026 untuk triwulan I masih perlu dihitung mengingat di akhir renstra terdapat target sebesar 15%.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2026 dengan Realisasi Secara Nasional (terhadap PDB)**

Tabel. 14
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2026
(dibandingkan realisasi secara nasional)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi terhadap PDB Nasional
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Pertumbuhan Omzet Perdagangan	-%	-%

Penjelasan:

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2026 dan realisasi terhadap PDB secara nasional disebabkan pengukuran kinerja angka PDB secara nasional belum dipuklis sehingga sampai saat ini belum dapat data (Nol).

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 untuk indikator Pertumbuhan Pertumbuhan Omzet Perdagangan :

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Indikator program ini adalah persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi dengan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah fasilitasi izin usaha dibagi jumlah pelaku usaha yang} \\ & \text{mengurus izin usaha dikali 100\%} \\ & = 642 / 642 \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Pada triwulan I, terdapat 642 (enam ratus empat puluh dua) pelaku usaha yang mengurus izin dan telah difasilitasi dalam pengurusan izinnya melalui aplikasi OSS. Realisasi indikator kinerja pada triwulan I tahun 2026 sebesar 642 izin terhadap target 642 izin (capaian 100%) **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

1) Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan

Sasaran kegiatan adalah persentase rekomendasi izin yang diberikan kepada pengelolaan pasar rakyat pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan dengan menggunakan formula:

(Jumlah Izin toko swalayan yang diterbitkan kurang lebih 5 hari kerja dibagi jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar dikali 100%)
= - %

Realisasi indikator kinerja padatriwulan I tahun 2026 belum ada pengajuan permohonan pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan maupun izin usaha toko swalayan.

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pemantauan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, Agen, Grosir/Perkulakan dan Toko swalayan Melalui Sistem Perizinan Berusaha Melalui Sistem Elektronik

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha. Untuk mengukur capaian indikator kinerja menggunakan formula:

(Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, Agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui sistem perizinan berusaha melalui sistem elektronik.
= - laporan

Berdasarkan penetapan target kinerja triwulan I tahun 2026 untuk sub kegiatan tersebut belum ada target sesuai rencana aksi ditergetkan pada triwulan IV.

2) Kegiatan Pengendalian Fasilitasi Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan distribusi Pengemasn dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya pengendalian, pengawasan bahan berbahaya, untuk mengukur capaian indikator kegiatan menggunakan formula:

(Jumlah fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya yang sesuai standar dibagi Jumlah fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya yang diawasi dikali 100%.
= - %

Sesuai dengan rencana aksi pada triwulan I belum adanya pelaksanaan pengawasan fasilitasi bahan berbahaya kerana masih dalam tahap pengumpulan data tentang lokasi penyimpanan bahan berbahaya di kabupaten luwu timur sehingga belum ada realisasi.

a. Sub Kegiatan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya

Sasaran dari sub kegiatan tersebut adalah terlaksananya pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya. Untuk mengukur indikator tersebut dengan menggunakan formula:

(Jumlah laporan hasil pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya
= - laporan

Pada triwulan I belum ada target dan akan dirampungkan pada triwulan IV sesuai rencana aksi untuk memperoleh pencapaiannya.

2. Peningkatan Saran Distribusi Perdagangan

Sasaran program peningkatan sarana distribusi perdagangan adalah meningkatnya omzet pedagang dengan indikator persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

(Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dimanfaatkan dibagi Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dikali 100%
= - %

Realisasi berdasarkan indikator persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya Triwulan I Tahun 2026 belum ada sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya, di triwulan I masih tahap proses administrasi lelang.



1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sasaran kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yaitu meningkatnya pengelolaan pasar dan sarana prasarana distribusi perdagangan dengan indikator jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

$$\frac{\text{Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan}}{\text{Total Sarana Prasarana}} \times 100\%$$

Untuk kegiatan tersebut, dalam perencanaan target kinerja ditetapkan di ditriwulan Iv untuk 6 pasar yang akan ditingkatkan kualitasnya antara lain :

1. Pembangunan Pasar Tomoni Tahap III
2. Pembuatan MCK dan Instalasi Air Bersih Pasar Cendana Hijau
3. Penataan Halaman Pasar Angkona
4. Penataan Halaman Pasar Lakawali

- 5. Penataan Halaman Pasar Taripa
- 6. Penimbunan Halaman Pasar Timampu.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya peningkatan kualitas pasar rakyat dengan indikator jumlah sarana distribusi perdagangan. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah sarana distribusi perdagangan
= -

Berdasarkan penetapan target kinerja untuk indikator jumlah pasar yang ditingkatkan kualitasnya serta sarana dan prasarananya ditetapkan tahun 2026 sebanyak 6 pasar yang ditingkatkan kualitasnya dan ditargetkan ditriwulan IV.

2. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan. Tahun 2026, pencapaian target kinerja ditargetkan ditriwulan I. Adapun formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah:

Jumlah pengelola pasar yang di-UPTD yang dibina dibagi Jumlah Pasar yang di UPTD yang dibina pada tahun-n x 100%
= 61,44%

a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan. Tahun 2026, pencapaian target kinerja ditetapkan ditriwulan IV. Adapun formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah:

Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina pada tahun-n
= -

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Untuk program Stabilisasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting ditargetkan pada triwulan I diukur dengan formula :

$$KVpt = \frac{Sn}{P} \times 100\%,$$

KVpt = koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu;

Sn = Standar deviasi harga rata-rata kabupaten selama 1 tahun;

P = Rata-rata harga kabupaten barang kebutuhan pokok.

No	Periode	Rata-Rata (Sn)	Rata-Rata Harga (P)	Koefisien variasi harga (KvPt)
1	Januari 2026	917,47	Rp. 27.968,89	3,28%
2	Februari 2026	970,05	Rp. 28.485,06	3,41%
3	Maret 2026	1.032,16	Rp. 29.880,00	3,45%
Rata-Rata Triwulan I				3,38%

Koefisien variasi harga kebutuhan pokok menggambarkan seberapa jauh fluktuasi harga yang terjadi untuk setiap komoditi atau barang kebutuhan pokok yang dipantau. Di Kabupaten Luwu Timur dilakukan pemantauan terhadap 11 pasar dan 11 kecamatan. Kondisi yang diharapkan adalah angka koefisien variasi semakin kecil karena semakin rendah angka koefisien variasi berarti kondisi harga barang kebutuhan pokok semakin stabil. Sehingga diperoleh data bahwa pada triwulan I koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok 3,38% dibandingkan dengan target pada triwulan I sebesar 8,5% yang berarti variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu cenderung stabil karena nilai koefisien yang diperoleh lebih kecil dari target triwulan I sehingga diperoleh persentase capaiannya sebagai berikut :

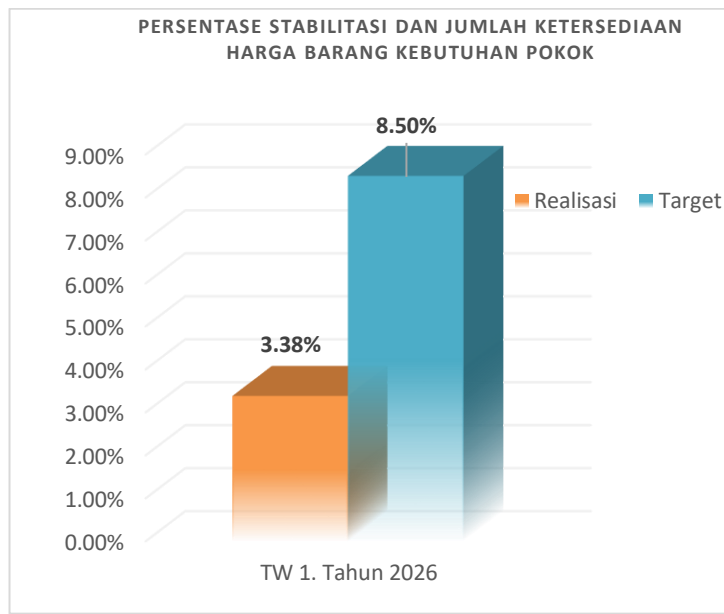
$$KVpt = \frac{Sn}{P} \times 100\%,$$

$$KVpt = \frac{-8,5\% - 3,38\%}{-8,5\%} \times 100\%$$

$$= 60,24\%$$

Triwulan I Tahun 2026, terealisasi 3,38% persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dari target kinerja sebesar 8,5%. Capaian kinerja 60,24%. **Predikat kinerja baik.** Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan harga barang kebutuhan pokok seperti :

1. Ketersediaan stok barang kebutuhan pokok
2. Meningkatnya permintaan secara mendadak seperti menjelang hari raya.
3. Cuaca dan Musim
4. Distribusi logistik.



Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yaitu :

1. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk tercapainya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali yang menjadi indikator dari kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting dapat dihitung dengan formula :

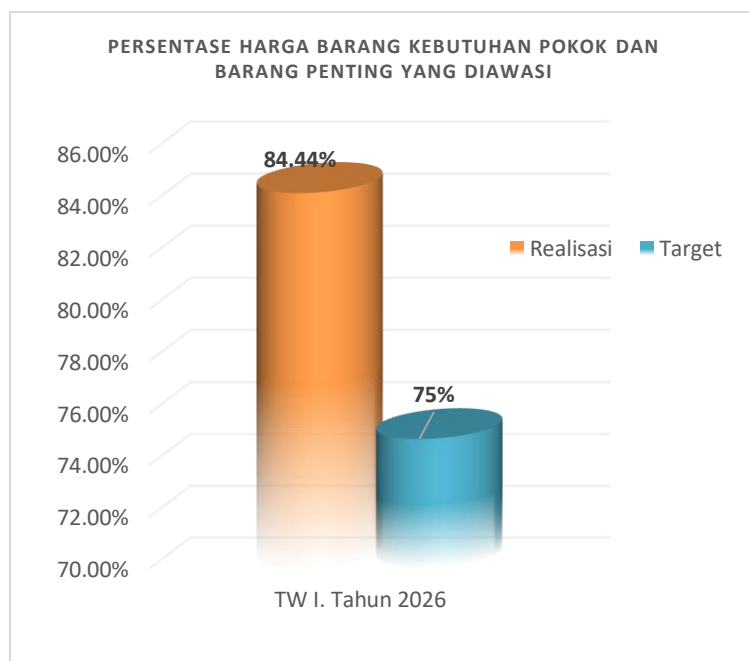
$((\text{Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali dibagi jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang diawasi}) \times 100\%$

$= (38 / 45) \times 100\%$

$= 84,44\%$

Sehingga realisasi dari kegiatan tersebut ditriwulan I tahun 2026 sebesar 84,44% dengan target yang ditetapkan sebesar 75% (capaian 112,59%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

Kegiatan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar terdapat 45 barang kebutuhan pokok dan dan barang penting yadiawasi dan terdapat 7 barang kebutuhan pokok yang mengalami fluktuasi harga seperti daging ayam, telur ayam, cabe rawit merah, bawang merah, ikan cakalang, kacang tanah dan kentang selama triwulan I sedangkan 38 barang pokok lainnya masih dalam harga normal.



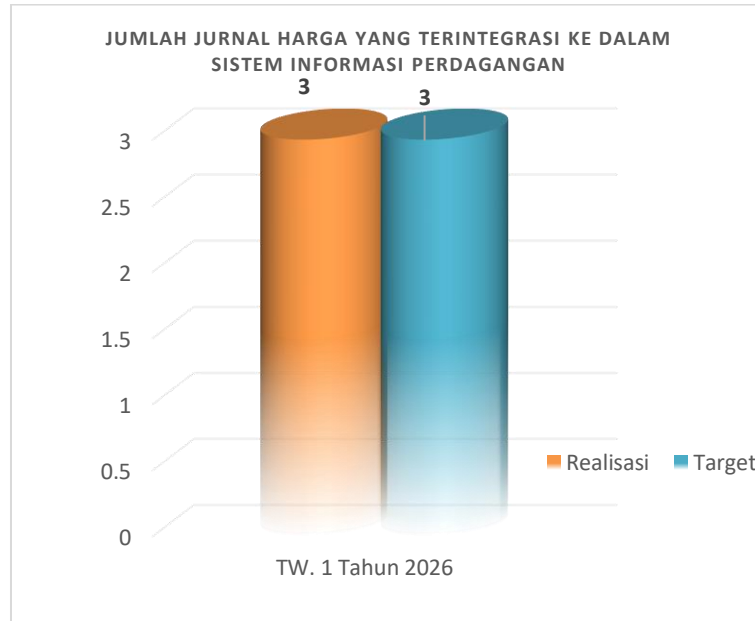
a. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan

Sasaran Sub Kegiatan adalah tersedianya data jurnal harga dalam aplikasi sistem informasi perdagangan. Jumlah jurnal harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan yang merupakan indikator dari sub

(Jumlah jurnal harga yang terintegrasi kedalam sistem informasi perdagangan pada triwulan n tahun n-

= 3 laporan

kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan dapat dihitung dengan formula :



Realisasi yang diperoleh dari sub kegiatan ini ditriwulan I tahun 2026 sebanyak 3 laporan yang telah terintegrasi ke dalam aplikasi dinas perdagangan propinsi Sulawesi selatan dengan target 3 laporan (capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan sembako yang murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada hari raya keagamaan. Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar yang merupakan indikator dalam sub kegiatan ini dapat dihitung dengan formula:

(Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 kabupaten/kota pada tahun ke-n

= 11 laporan

Realisasi yang diperoleh dari sub kegiatan ini ditriwulan I tahun 2026 sebanyak 11 laporan dengan target 11 laporan (capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

Kegiatan operasi pasar telah dilaksanakan pada bulan maret 2026 menjelang hari raya idul fitri, metode yang dilakukan dalam operasi pasar adalah dengan menjual sembako kepada masyarakat. Harga yang diberikan ke masyarakat merupakan harga yang telah disubsidi oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan harga paket sebesar Rp. 135.000,-. Target penerima paket sembako adalah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 4.000 RTM tersebar di 11 kecamatan.

2. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatnya kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida agar dapat tersalur tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna pupuk secara optimal. Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida yang merupakan indikator dari kegiatan tersebut dapat dihitung dengan formula :

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah pupuk bersubsidi dan pestisida yang disalurkan dibagi Jumlah} \\ & \text{pupuk bersubsidi dan pestisida yang diterima)} \times 100\% \\ & = (9.713,414 \text{ ton} / 16.221,891 \text{ ton}) \times 100\% \\ & = 67,36\% \end{aligned}$$

Sesuai aturan terbaru Nomor 1117/Kpts./SR.31/M/10/2025 bahwa yang termasuk pupuk bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai berikut

- Pupuk Urea dengan HET = Rp. 1.800/kg
- Pupuk NPK, dengan HET = Rp. 1.840/kg
- Pupuk NPK untuk Kakao dengan HET Rp. 2.640/kg
- Puuk Organik dengan HET Rp. 640/kg

adapun data penyaluran pupuk subsidi di tingkat pengecer ke kekelompok tani sebagai berikut :

No	Jenis Pupuk	Jumlah Stok Awal dan Penebusan (Ton)	Jumlah Penyaluran (Ton)	Persentase Capaian
Dari Tingkat Distributor ke Pengecer				
1	Urea	5.178,00	4.832,00	93,32%
2	NPK Phonska	6.693,75	6.400,75	95,62%

3	Organik	559,00	549,00	98,21%
4	NPK Formula Kusus Kakao	918,00	918,00	100,00%
Rata-Rata Triwulan I				96,79%

No	Jenis Pupuk	Jumlah Stok Awal dan Penebusan (Ton)	Jumlah Penyaluran (Ton)	Persentase Capaian
Dari Tingkat Pengecer ke Kelompok Tani				
1	Urea	6.123,112	3.737,016	69,96%
2	NPK Phonska	8.403,491	4.999,682	68,57%
3	Organik	643,300	452,660	70,37%
4	NPK Formula Kusus Kakao	1.051,988	524,056	60,55%
Rata-Rata Triwulan I				67,36%

Realisasi untuk kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota ditriwulan I tahun 2026 sebesar 67,36% dengan target 100% (capaian 67,36%) dengan **predikat kinerja Baik**.



a. Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida. Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi

merupakan indikator dari sub kegiatan tersebut yang dapat dihitung dengan formula :

(Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi pada triwulan n tahun-n

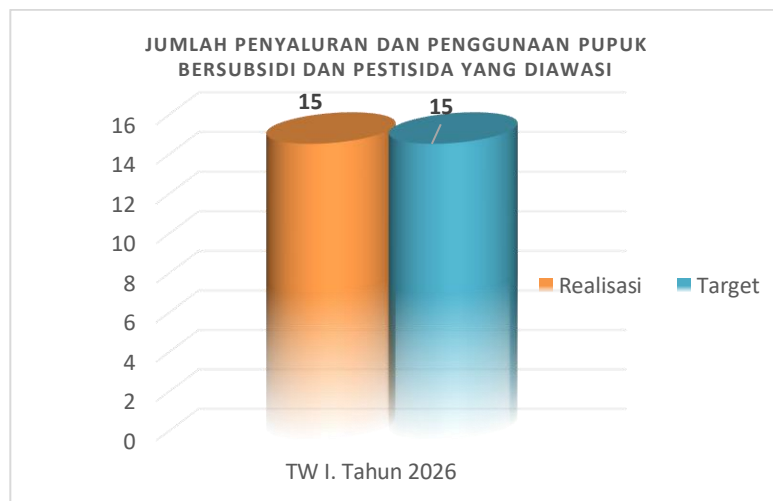
= 15 Laporan

Pada triwulan I tahun 2026 terdapat 15 (lima belas) laporan penyaluran pupuk bersubsidi dari 5 (lima) distributor pupuk bersubsidi periode bulan Januari – Maret 2026. Adapun 6 (enam) distributor pupuk bersubsidi pupuk subsidi adalah :

1. PT. Pupuk Indonesia Niaga
2. PT. Graha Agro Nusantara
3. PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia
4. CV. Putra Bungsu Sesa
5. CV. Bunga Padi
6. PT. Growenta Agrindo Nusantara.

Sehingga untuk sub kegiatan ini berdasarkan rencana aksi tahunan yang ditetapkan di triwulan I tahun 2026 diperoleh angka realisasi sebanyak 15 laporan dari target 15 laporan (capaian 100%).

Predikat kinerja sangat memuaskan

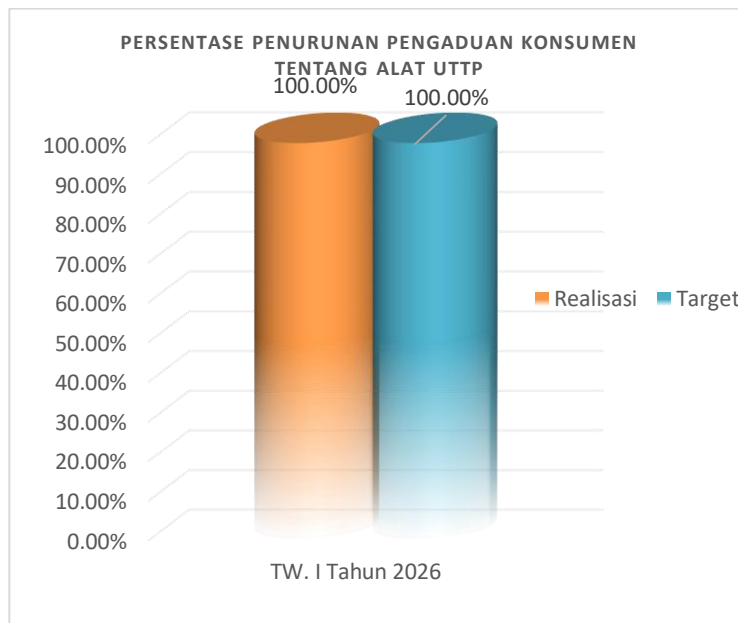


4) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Sasaran program "Terciptanya perlindungan konsumen dan tertib niaga" dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP yang diukur dengan formula :

$$\begin{aligned} & (\text{Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani pada tahun} \\ & \text{berjalan dibagi jumlah pengaduan konsumen yang masuk pada} \\ & \text{tahun berjalan}) \times 100\% \\ & = 1/1 \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Pada triwulan I, terdapat 1 (satu) aduan dari SPBU Labose kec. Malili dan telah ditangani pengaduannya sehingga diperoleh capaian triwulan I tahun 2026, ter dapat 1 (satu) aduan. Berdasarkan target yang telah ditetapkan ditriwulan I tahun 2026 sebesar 100% aduan kosumen terkait UTTP diperoleh realisasi sebesar 100% (capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**



Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program standarisasi dan perlindungan konsumen yaitu :

a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya sehingga tercapai keamanan produk bagi konsumen. Persentase alat ukur, takar,

timbang dan perlengkapannya yang diawasi yang menjadi indikator kegiatan dapat dihitung dengan formula:

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang} \\ & \text{diawasi pada tahun berjalan) dibagi Jumlah alat ukur, takar, timbang dan} \\ & \text{perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang) x 100\%} \\ & = 15/20 \times 100\% \\ & = 75\% \end{aligned}$$

Pada kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui cap tanda tera sah pada UTTP dengan data sebagai berikut:

No	Pemilik UTTP	Kecamatan	Jumlah UTTP yang diawasi
1	SPBU Labose	Malili	8
2	SPBU Wotu	Wotu	4
3	PT. Citra Lampia Mandiri	Malili	3
TOTAL			15

Pada tahun 2026 triwulan I, realisasi terhadap pengawasan UTTP sebesar 75% dari target yang ditetapkan sebesar 80% (capaian 93,75%).

Predikat kinerja sangat memuaskan



a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

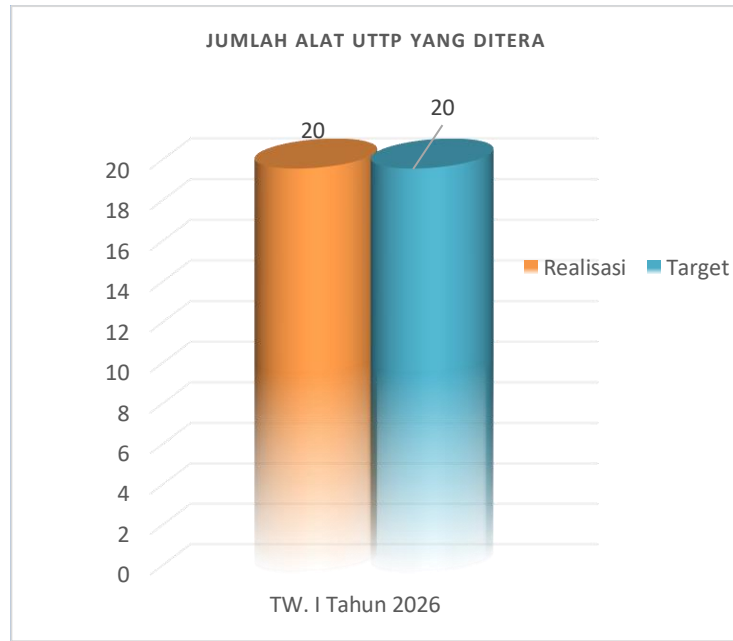
Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya proses tera/tera ulang pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Sub kegiatan ini dapat diukur dengan menggunakan formula :

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)} \\ & \text{yang ditera/tera ulang pada triwulan n- tahun n} \\ & = 20 \text{ alat UTTP} \end{aligned}$$

Terdapat 20 (dua puluh) kegiatan pelayanan tera/tera ulang pada triwulan I yang telah dilaksanakan dengan data sebagai berikut :

Pada sub kegiatan ini diperoleh realisasi triwulan I tahun 2026 sebanyak 20 alat UTTP yang ditera, tera ulang dari target yang ditetapkan di triwulan I sebanyak 25 alat UTTP (capaian 80%). **Predikat kinerja sangat baik.**

No	Nama Perusahaan/ Pemilik UTTP	Kecamatan	Jumlah UTTP	Tera Ulang	%
1	SPBU Labose	Malili	8	8	100
2	Pertashop CV. Shopping BBM	Wotu	1	1	100
3	PT. Citra Lampia Mandiri	Malili	3	3	100
4	SPBU Wotu	Wotu	4	4	100
5	PT. Indah Cargo	Malili	1	1	100
6	PT. Bangunindo Karya Utama	Towuti	3	3	100
TOTAL			20	20	100%



b. Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Sasaran pada sub kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman tentang pentingnya tera dan tera ulang alat takar, timbang dan perlengkapannya agar tidak terjadi kecurangan dalam hal takar menakar atau jual beli yang dilakukan oleh pedagang. Untuk mengukur capaian kinerja dengan menggunakan formula :

(Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina
= 31 orang

Terdapat 31 pelaku usaha dibidang metrologi legal di pasar tampinna yang telah dibina pada triwulan I. Dalam hal ini dilakukan pembinaan kepadapelaku usaha terkait penggunaan UTTP dan menyampaikan kepada pemilik UTTP agar tidak melepas cap tanda tera atau segel. Sehingga capaian kinerja pada sub kegiatan ini dari target sebanyak 35 orang dan raelisasi sebanyak 31 orang atau capaian 88,57%, **Predikat kinerja memuaskan.**

2. Indikator Kinerja II

a. Pertumbuhan Nilai Ekspor Perdagangan

Triwulan I Tahun 2026, ditargetkan pertumbuhan Nilai Ekspor Perdagangan sebesar 1,15% belum dapat dihitung pada triwulan I disebabkan belum adanya laporan ekspor dari instansi terkait.

3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor Perdagangan

- **Pertumbuhan Nilai Ekspor Perdagangan**
 - **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Tabel. 15
Realisasi Indikator Sasaran II Triwulan I Tahun 2026
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Pertumbuhan Nilai Ekspor Perdagangan	5%	-%	-%

Penjelasan:

Pertumbuhan Nilai Ekspor Perdagangan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis 2 belum ada pencapaian angka pertumbuhan karena belum ada laporan sampai triwulan I berakhir dari pihak terkait.

Realisasi pertumbuhan sub sektor perdagangan tersebut diperoleh dari formula .

(Nilai perdagangan sub sektor perdagangan pada triwulan (n) tahun-n dikurangi nilai perdagangan sub sektor perdagangan pada triwulan (n) tahun (n-1) dibagi nilai perdagangan sub sektor perdagangan pada triwulan (n) tahun (n-1)) x 100%

= (Omzet pedagang Triwulan I Tahun 2026 + Nilai ekspor Triwulan I Tahun 2025) - (Omzet pedagang Triwulan I Tahun 2025 + Nilai Ekspor Triwulan I Tahun 2025) dibagi (Omzet pedagang Triwulan I Tahun 2025 + Nilai Ekspor Triwulan I Tahun 2025)

= x 100%

= %

- Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025

Tabel. 16
Realisasi Indikator Sasaran II Triwulan I Tahun 2026
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. I Tahun 2026	Realisasi TW. I Tahun 2025
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Pertumbuhan Nilai Ekspor Perdagangan	-%	-%

Penjelasan:

Realisasi Pertumbuhan Nilai Ekspor Perdagangan Triwulan I Tahun 2026 belum ada dan belum bisa dibandingkan pada periode sebelumnya.

- Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Akhir Renstra

Tabel. 17
Realisasi Indikator Sasaran TW. I Tahun 2026
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2026	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Pertumbuhan Nilai Ekspor Perdagangan	-%	5%

Penjelasan:

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja Triwulan I Tahun 2026 belum ada perhitungan pertumbuhan terhadap target akhir renstra sebesar 5% maka secara umum masih perlu ditingkatkan karena belum ada dari target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW. I Tahun 2026 dengan Realisasi Secara Nasional**

Tabel. 18
Realisasi Indikator Sasaran TW. I Tahun 2026
(dibandingkan realisasi secara nasional)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. I Tahun 2026	Realisasi Secara Nasional
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Pertumbuhan Nilai Ekspor Perdagangan	-%	-%

(sumber data :

Penjelasan:

Laporan Triwulan I 2026 Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional pertumbuhan sektor perdagangan belum mendapatkan data . Dengan periode yang sama untuk Kabupaten Luwu Timur pada pertumbuhan nilai ekspor perdagangan belum mendapatkan data

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 untuk indikator Pertumbuhan Nilai ekspor perdagangan meliputi 1 program terdiri dari:

1. Program Pengembangan Ekspor

Sasaran program adalah meningkatnya nilai ekspor perdagangan dengan indikator kinerja “ persentase peningkatan nilai ekspor”. Untuk mengukur indikator yang telah ditetapkan menggunakan rumus formula :

$$\begin{aligned} & \text{Realisasi nilai ekspor barang kenegara lain dalam satu tahun dibagi} \\ & \text{Target jumlah nilai ekspor barang kenegara lai dalam 1 tahun x 100\%} \\ & = \quad \times 100\% \\ & = \quad \% \end{aligned}$$

Namun dalam triwulan I, belum adanya terbit laporan ekspor sehingga belum dapat menampilkan nilai ekspor barang.



1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan adalah terfasilitasinya produk unggulan dalam promosi dagang dengan indikator kegiatan “ Persentase prosuk yang memperoleh fasilitas promosi dagang. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

$$\frac{\text{Jumlah produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang pada tahun berjalan}}{\text{jumlah produk unggulan}} \times 100\%$$

$$= -$$

Tahun 2026, kegiatan promosi dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor ditargetkan ditriwulan II .

a. Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pameran dagang bagi produk ekspor unggulan. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah:

$$\frac{\text{Jumlah produk ekspor unggulan yang diikutsertakan dalam pameran dagang nasional}}{\text{jumlah produk ekspor unggulan}} \times 100\%$$

$$= -$$

sesuai dengan jadwal Trade Expo Indonesia (TEI) oleh Kementerian Perdagangan.

b. Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pameran dagang bagi produk UMKM dan produk ekspor unggulan. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah:

Jumlah pelaku yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal

= -

Adapun target pelaksanaan sub kegiatan ini pada triwulan III atau mengikuti jadwal pelaksanaan pameran lokal yang diadakan oleh penyelenggara ekspor maupun dinas terkait.

c. Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan dengan indikator “jumlah pelaku usaha yang di fasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan. Adapun target pelaksanaan kegiatan ini pada triwulan IV atau mengikuti jadwal pelaksanaan Trade Expo Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan RI. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah pelaku yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan

= -

d. Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan terhadap pelaku usaha ekspor tentang peningkatan SDM, daya saing dan promosi dengan indikator jumlah produk unggulan Ekspor Daerah yang disusun menjadi materi promosi. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang disusun menjadi materi promosi

III.2.2 Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Triwulan I Tahun 2026 untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis II terdiri dari 5 program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.881.662.200,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 86.411.000,- sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar 4,59%. Dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 52,04%, sehingga dapat disimpulkan pada sasaran ini terjadi efisiensi Anggaran sebesar 47,45%.

Ket : Tingkat Efisiensi = Capaian Kinerja – Penyerapan Anggaran

Tabel. 19 Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk Sasaran Strategis II Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target TW I. 2026	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	Predikat Kinerja
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	10%	10%	100%	Rp.-	-%	Capaian kinerja Sangat Memuaskan
	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Rekomendasi Izin yang diberikan kepada pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan	-%	-%	-%	Rp. -	-%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Sub Kegiatan Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakandantoko swalayan melalui sistem perizinan berusaha melalui sistem	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui sistem perizinan berusaha	- laporan	- laporan	%	Rp. -	-%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV

	elektronik	melalui sistem elektronik						
	Kegiatan Pengendalian fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pengawasan pelabelan pengawasan pelabelan bahan berbahaya	-%	-%	-%	Rp.-	-%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Sub Kegiatan Pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya	Jumlah laporan hasil pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya	- Laporan	-Laporan	%	Rp. -	-%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pertumbuhan omzet pedagang pasar vrakyat yang telah dibangun/ direvitalisasi	-%	-%	-%	Rp. 67.120.000	0,32%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah prasarana/sarana distribusi perdagangan yang terfaatkan	-	-	-	Rp. 15.870.000	0,08%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	-	-	-	Rp. 15.870.000	0,08%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi	Persentase peningkatan kapasitas pengelolaan sarana	100%	61,44%	61,44%	Rp, 51.250.000	15,94%	Capaian kinerja baik

Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	distribusi perdagangan							
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	- laporan	- laporan	- %		Rp, 51.250.000	15,94%	Capaian kinerja ditargetkan dan ditriwulan IV
Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	8,5%	3,38%	60,24%		Rp. 17.471.000	2,68%	Capaian kinerja baik
Kegiatan Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali	75%	84,44%	112,59%		Rp. 11.525.000		Capaian kinerja sangat memuaskan
Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang	3 laporan	3 laporan	100%		Rp. 8.230.000		Capaian kinerja sangat memuaskan

		terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan						
	Sub Kegiatan Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	11 laporan	11 laporan	100%	Rp. 3.295.000	0,62%	Capaian kinerja sangat memuaskan
	Kegiatan Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	100%	67,36	67,36%	Rp. 5.946.000	18,96%	Capaian kinerja baik
	Sub Kegiatan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	15 laporan	15 laporan	100%	Rp. 5.946.000	18,96%	Capaian kinerja sangat memuaskan
	Program Standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100%	100%	100%	Rp. 1.820.000	0,89%	Capaian kinerja sangat memuaskan
	Kegiatan Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi	80%	75%	93,75	Rp. 1.820.000		Capaian kinerja sangat memuaskan

	Sub Kegiatan Pelaksanaan metrolegi legal, berupa tera, tera ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	25 UTPP	20 UTPP	80%	Rp. 1.820.000	0,89%	Capaian kinerja sangat baik
	Sub Kegiatan Pengawasan/penyuluhan metrologi legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	35 orang	31 orang	88,57%	Rp. -	-%	Capaian kinerja memuaskan
	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Barang	-%	-%	-%	Rp. -	-%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang	-%	-%	-%	Rp. -	-%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	- pelaku usaha	- pelaku usaha	-%	Rp. -	-%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	- pelaku usaha	- pelaku usaha	-%	Rp. -	-%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Sub Kegiatan Misi Dagang	Jumlah pelaku usaha	- pelaku	- pelaku usaha	- %	Rp. -	-%	Capaian kinerja

	bagi Produk Ekspor Unggulan	ekspor yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	usaha					ditargetkan di triwulan II
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	- pelaku usaha	- pelaku usaha	- %	Rp. -	-%	Capaian kinerja ditargetkan di triwulan IV

III.2.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting capaian kinerja tidak melampaui target yang direncanakan pada rencana aksi 8,5% sedangkan realisasi hanya 3,38% atau setara 60,24%. Ini menandakan harga bahan kebutuhan pokok secara keseluruhan stabil sepanjang triwulan I karena masih dibawa target yang ditentukan.
- b. Program pengembangan ekspor, capaian belum dapat dihitung karena belum ada data terkait jumlah ekspor barang. Untuk sub kegiatan yang termasuk dalam program pengembangan ekspor yaitu pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten/kota ditargetkan di triwulan II, sub kegiatan pembinaan pelaku usaha ekspor ditargetkan di triwulan IV dan untuk sub kegiatan pameran dagang capaian kinerja ditargetkan di triwulan IV.
- c. Program Standarisasi dan perlindungan konsumen capainnya telah memenuhi target dari rencana aksi karena hanya ada satu aduan dari SPBU Labose dan telah ditindak lanjuti aduan tersebut sehingga capaian mencapai 100%.

1.3 Capaian Sasaran Staretgis 3

3. Indikator Kinerja I

b. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri sebesar 0,63% ditargetkan ditriwulan IV sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan dan berdasarkan hasil Laporan BPS yang dirilis pada akhir tahun.

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri

▪ Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri

Tabel. 20
Realisasi Indikator Sasaran III Triwulan I Tahun 2026
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kecil Menengah	0,163%	-%	-%

Penjelasan:

Pertumbuhan nilai produksi Industri Kecil Menengah akan diukur pencapaian kinerja ditriwulan IV berdasarkan rencana aksi dan laporan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun rumus formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$(\text{Nilai Produksi IKM Tahun } n - \text{Nilai produksi IKM Tahun } n-1) \div \text{Nilai Produksi IKM Tahun } n-1) \times 100\%$

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW. I Tahun 2026 dengan Tahun TW. I Tahun 2025**

Tabel. 21
Realisasi Indikator Sasaran TW. I Tahun 2026
(dibandingkan realisasi TW. I Tahun 2025)

No.	Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Realisasi TW. I Tahun 2026	Realisasi TW. I Tahun 2025
1.	Meningkatnya pertumbuhan Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kecil Menengah	-	-

Penjelasan:

Belum dapat diperbandingkan realisasi kinerja TW I Tahun 2026 dan realisasi kinerja TW. I Tahun 2025 disebabkan pengukuran kinerja dilaksanakan di triwulan IV.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW. I Tahun 2026 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 22
Realisasi Indikator Sasaran TW. I Tahun 2026
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Realisasi TW. I Tahun 2026	Target Akhir Renstra Tahun 2029
1.	Meningkatnya pertumbuhan Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kecil Menengah	-	0,201%

Penjelasan:

Belum dapat diperbandingkan realisasi kinerja TW I Tahun 2026 dan target akhir Renstra Tahun 2029 disebabkan pengukuran kinerja dilaksanakan di triwulan IV.

- Perbandingan Realisasi Kinerja TW. I Tahun 2026 dengan Realisasi Secara Nasional (terhadap PDB)

Tabel. 23
Realisasi Indikator Sasaran TW. I Tahun 2026
(dibandingkan realisasi secara nasional)

No.	Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Realisasi TW. I Tahun 2026	Realisasi terhadap PDB Nasional
1.	Meningkatnya pertumbuhan Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kecil Menengah	-	-

Penjelasan:

Belum dapat diperbandingkan realisasi kinerja TW I Tahun 2026 dan realisasi terhadap PDB secara nasional disebabkan pengukuran kinerja dilaksanakan di triwulan IV angka PDB secara nasional dirilis diakhir tahun berkenaan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 3 untuk indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kecil Menengah :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan industri

Sasaran program yaitu persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri. Sesuai Rencana Aksi yang telah ditetapkan pencapaian kinerja untuk program perencanaan dan pembangunan industri pencapaian kinerja ditargetkan tahun 2026 pada triwulan II dan IV. Untuk mengukur capaian kinerja dengan menggunakan formula rumus :

$$\text{= } \frac{\text{(Nilai Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri / Total Investasi Seluruh Sektor)}}{\text{}} \times 100\%$$

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian program perencanaan dan pembangunan industri:

1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen revisi siteplan kawasan industri yang ditetapkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi. Sesuai dengan Rencana Aksi yang ditetapkan pencapaian kinerja kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota tahun 2026. Untuk mengukur capaian kinerja dijabarkan dengan menggunakan rumus formula :

(Jumlah dokumen realisasi investasi sektor industri
= 1 Dokumen

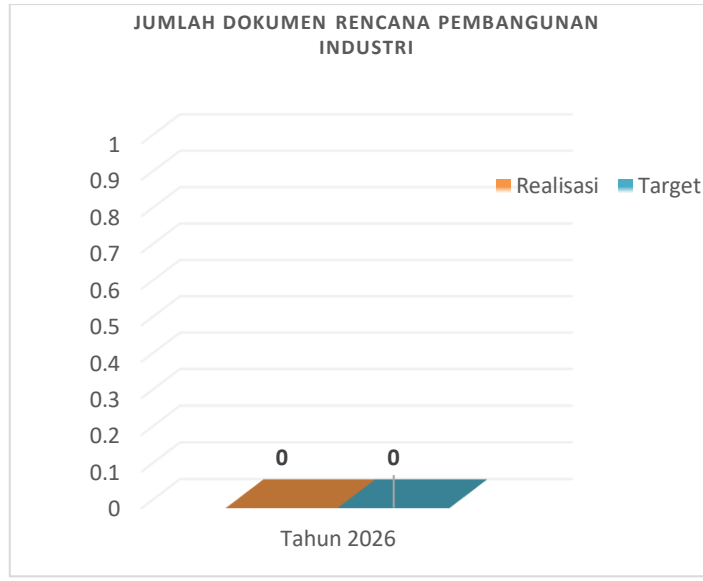
Realisasi untuk kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri ditriwulan I tahun 2026 target 1 dokumen relisasi 100% dengan predikat **kinerja sangat memuaskan**.

a. Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Target sub kegiatan ini sebanyak 1 Laporan dalam sentra yang dibina dan dikembangkan, sesuai rencana aksi. Ditargetkan pada triwulan IV. Untuk mengukur capaian kinerja dijabarkan dengan menggunakan rumus formula :

(Jumlah dokumen rencana pembangunan industri pada triwulan n-
tahun n
= 1 dokumen

Realisasi terhadap target untuk sub kegiatan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri pada triwulan I tahun 2026 sebanyak 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan**.



b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan IKM berupa kegiatan kolaborasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah dengan unit kerja dalam bentuk keikutsertaan pada kegiatan pameran Inacraft. Indikator. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan..** Capaian indikator sub kegiatan diukur dengan menggunakan rumus formula :

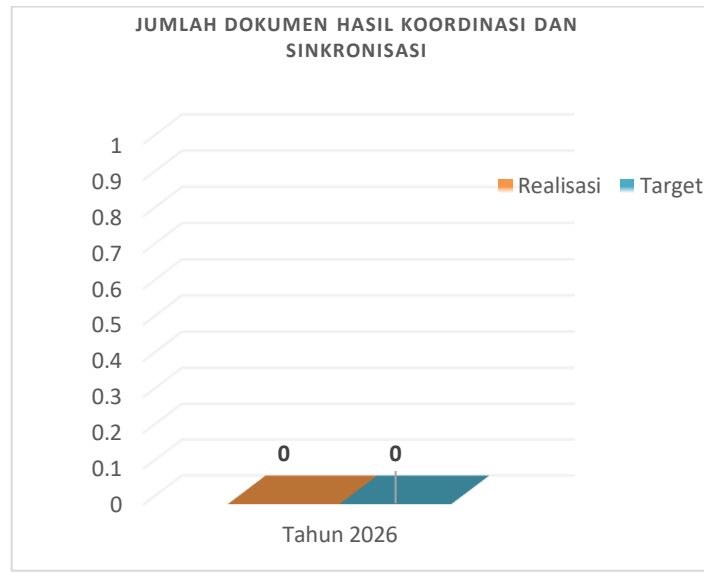
(Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri pada triwulan n- tahun n
= 1 dokumen



c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri. Pada sub kegiatan ini direncanakan pada triwulan II, III dan IV sesuai dengan rencana aksi. Untuk mengukur capaian indikator sub kegiatan menggunakan formula

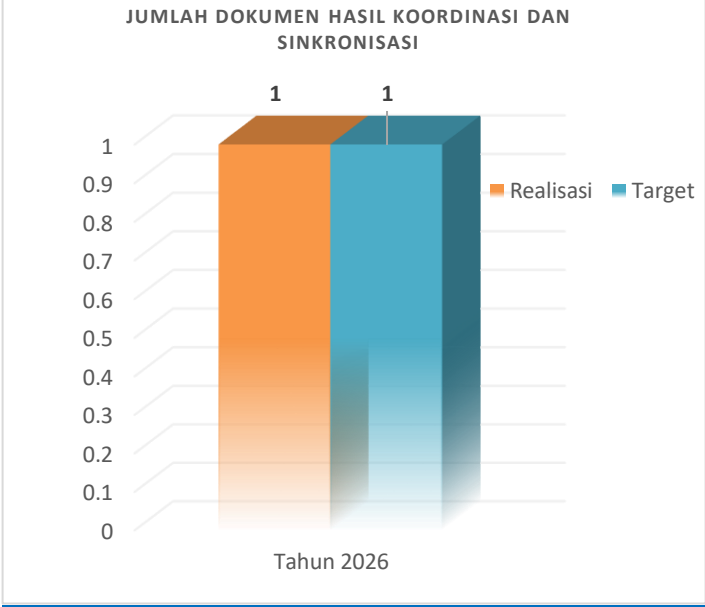
$$\frac{\text{(Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana industri)}}{\text{= - dokumen}}$$



d. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Target yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah 1 dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat dan terealisasi sebanyak 1 dikumen sehingga persentase capaian kinerja 100% (**Capaian sangat memuaskan**). Dokumen tersebut dalam bentuk pelaporan kegiatan sosialisasi penerapan Cara Produksi Pangan olahan yang baik (CPPOB) yang diikuti oleh pelaku usaha IKM pangan sebanyak 20 IKM dan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2026 di aulah Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian. Untuk mengukur capaian indikator sub kegiatan menggunakan formula :

(Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan industri dan peran serta masyarakat pada triwulan n- tahun n
 = 1 dokumen

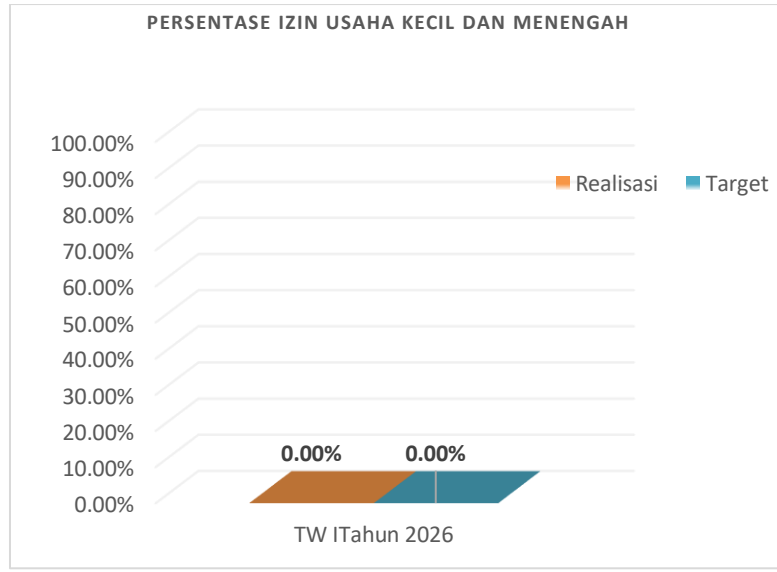


2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Target yang ditetapkan untuk program ini adalah 21%, dengan indikator persentase izin usaha yang diterbitkan yang diukur dengan menggunakan formula : .

(Jumlah usaha industri yang diterbitkan dibagi jumlah izin usaha industri yang difasilitasi dikali 100%
 = - %

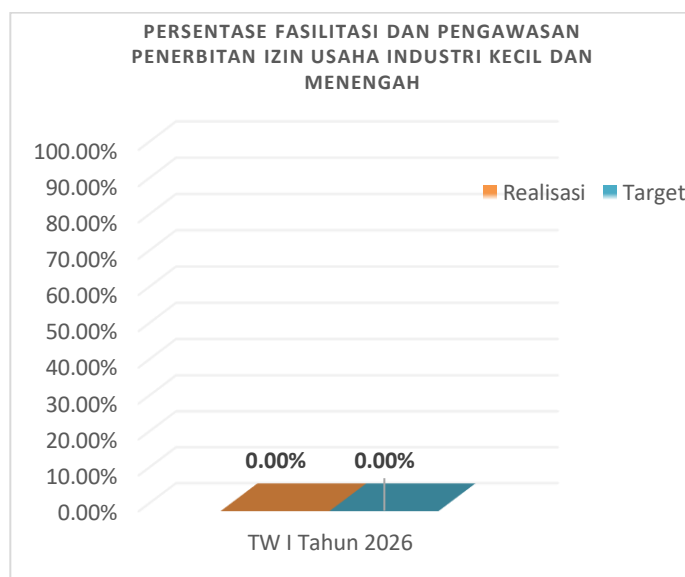
Sesuai rencana aksi yang ditetapkan target kinerja untuk program Pengendalian izin usaha industri ditetapkan pada triwulan II.



1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Target yang ditetapkan untuk kegiatan ini adalah 43% dengan dengan indikator kinerja persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali. Kegiatan tersebut dapat diukur menggunakan formulasi :

(Jumlah penerbitan izin usaha industri dan perluasan usaha industri dibagi jumlah izin usaha industri dan menengah yang terkendali dikali 100%
 = - %



a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sesuai target yang ditetapkan pada sub kegiatan ini telah terlaksana sesuai target 1 dokumen hasil koordinasi perizinan usaha industri kecil dan menengah yang difasilitasi dan diawasi (Penerbitan NIB) dan terealisasi sebanyak 65 unit usaha industri, sehingga persentase capaian kinerja 100% atau **sangat memuaskan**. Menggunakan formula sebagai berikut :

(Jumlah dokumen laporan koordinasi dan pengawasan terhadap perizinan berusaha disektor perindustrian.
= 1 dokumen

b. Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online single Submission Risk base approach (OSSRBA)

sesuai target yang ditetapkan pada sub kegiatan ini dalam rencana aksi ditetapkan pada triwulan I tahun 2026 sebanyak 1 dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan penerbitan perizinan (rekomendasi) dan dapat dihitung menggunakan formula :

(Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha menengah- tinggi, tinggi melalui SIINas.
= 1 dokumen

Berdasarkan penetapan target kinerja triwulan I tahun 2026 untuk sub kegiatan tersebut diperoleh realisasi sebesar 1 dokumen dengan capaian 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan**.

3. Program Pengelolaan Sistem informasi Industri Nasional

Sasaran program yaitu terlaksananya pengelolaan, penyajian, pelayanan dan penyebarluasan data/informasi industri yang akurat dan relevan. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah persentase usaha industri

yang terkelola dalam sistem industri nasional. Tahun 2026, sesuai rencana aksi yang ditetapkan di program ini target kinerja sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen atau capaian 100% dengan **predikat sangat memuaskan**.

Formula rumus yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja adalah :

$$\frac{\text{(Jumlah usaha industri yang terdata secara lengkap, akurat dan terkini)}}{\text{= 1 dokumen}}$$

Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian program pengelolaan sistem informasi industri nasional:

1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

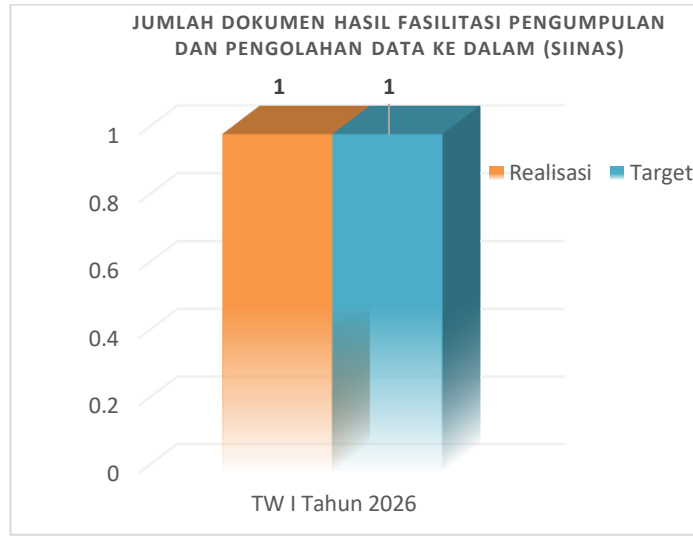
Sasaran kegiatan yaitu terlaksananya pengelolaan data usaha industri dalam sistem informasi industri nasional. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah persentase usaha industri yang terkelola dalam sistem informasi industri nasional. Tahun 2026, sesuai dengan Rencana Aksi yang ditetapkan kegiatan penyediaan informasi industri untuk IUI, IPU, IUKI kewenangan Kabupaten/Kota. pencapaian kinerja sebesar 1 dokumen dari target sebesar 1 dokumen, capaian sebesar 100% Formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah:

$$\frac{\text{(Jumlah usaha industri yang melaporkan perkembangan kegiatan usahanya pada SIINas dibagi jumlah usaha industri yang terdaftar pada SIINas)}}{\text{= 1 dokumen}}$$

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya data industri yang valid. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah jumlah data industri yang terintegrasi ke dalam sistem informasi industri nasional (SIINAS). Tahun 2024, sesuai dengan rencana aksi dari target 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%. Predikat kinerja **sangat memuaskan**. Formula rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut :

(Jumlah data industri yang terintegrasi ke dalam sistem informasi industri nasional SIINas)
= 1 dokumen



3.3.2 Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2026 untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis III terdiri dari 3 program dengan pagu anggaran pada triwulan I sebesar Rp. 168.851.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 79.077.316,- sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar 46,83%. Dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 66,66%, sehingga dapat disimpulkan pada sasaran ini terjadi efisiensi Anggaran sebesar 19,83%.

Ket : Tingkat Efisiensi = Capaian Kinerja – Penyerapan Anggaran

Tabel. 24 Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk Sasaran Strategis III Tahun 2026

Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2026	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	Predikat Kinerja
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi sektor Industri dan Kawasan Industri	-%	-%	-%	Rp. 76.547.316	3,78%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV

	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/ kota	Jumlah dokumen realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	1 dokumen	1 dokumen	100%	Rp. 76.547.316	3,78%	Sangat Memuaskan
	Penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	- dokumen	-dokumen	-%	Rp. -	-%	Capaian kinerja ditergetkan ditriwulan IV
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	1 dokumen	1 dokumen	100%	Rp. 71.997.316	12,28%	Sangat Memuaskan
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	- dokumen	-dokumen	-%	Rp. -	-%	Capaian kinerja ditergetkan ditriwulan IV
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan industri dan peran serta masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100%	Rp. 4.550.000	1,79%	Sangat Memuaskan
	Program Pengendalian Izin Usaha	Persentase izin usaha industri yang	-%	-%	-%	Rp. 690.000	1,06%	Capaian kinerja ditergetkan

	Industri	diterbitkan						an ditriwulan IV
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali	-%	-%	-%	Rp. 690.000	1,06%	Capaian kinerja ditergetkan ditriwulan IV
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha industri dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah yang berlokasi disatu kab/kota sepanjang merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 dokumen	1 dokumen	100%	Rp. 690.000	1,06%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan	Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan	1 dokumen	1 dokumen	100%	Rp. -	-%	Sangat Memuaskan

	usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem online single submission risk base approach (OSS RBA)	persyaratan/s tandar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkارت risiko usaha menengah – tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi sistem OSS RBA, bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat						
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	1 dokumen	1 dokumen	100%	Rp. 16.949.847	98,13%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Jumlah dokumen direktori sektor usaha industri	1 dokumen	1 dokumen	100%	Rp. 1.840.000	2,70%	Sangat Memuaskan

	Kewenangan Kabupaten/ Kota							
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)	1 dokumen	1 dokumen	100%	Rp. 1.840.000	2,70%	Sangat Memuaskan

3.3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan

- Program Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional pada Tahun 2026 telah dilakukan perbaikan data yang Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini untuk memudahkan penelusuran dan mempermudah pencarian data perindustrian dengan realisasi 100%. Dengan satu dokumen.
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri Sesuai target yang ditetapkan pada sub kegiatan ini telah terlaksana sesuai target 1 dokumen hasil koordinasi perizinan usaha industri kecil dan menengah yang difasilitasi dan diawasi (Penerbitan NIB) dan terealisasi sebanyak 65 unit usaha industri.
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada sub kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat dan terealisasi sebanyak 1 dokumen. Dokumen tersebut dalam bentuk pelaporan kegiatan sosialisasi penerapan Cara Produksi Pangan olahan yang baik (CPPOB) yang diikuti oleh pelaku usaha IKM pangan sebanyak 20 IKM

1.3 Capaian Sasaran Staretgis 4

Melalui Sasaran 4 "Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah. Peningkatan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah dapat terukur melalui capaian indikator Nilai Akip. Tahun 2026, realisasi indikator sebesar 58,68 dari target kinerja sebesar 72,02 dengan capaian kinerja sebesar 81,74%. Penilaian indikator kinerja menggunakan Renstra tahun 2025-2029.

- Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Tabel. 25
Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis IV	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi tahun 2026	Capaian Tahun 2026
1.	Meningkatnya Akintabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	72,02	58,68	81,74%

Penjelasan :

Untuk tahun 2026, realisasi kinerja program perangkat daerah sebesar 58,68 dari target yang telah ditetapkan sebesar 72,02 dengan angka capaian kinerja 81,74%. Realisasi kinerja untuk Sasaran Strategis IV dapat dihitung dengan menggunakan formula :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah keseluruhan capaian kinerja kegiatan urusan perangkat daerah}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan penunjang urusan perangkat daerah}} \times 100\% \\
 & = \frac{528,12}{9} \times 100\% \\
 & = 58,68\%
 \end{aligned}$$

- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2026 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel. 26
Realisasi Indikator Sasaran IV Tahun 2026
(dibandingkan realisasi tahun 2025)

No.	Sasaran Strategis IV	Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2026	Realisasi TW I Tahun 2025
1.	Meningkatnya Akintabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	58,68	97,90

Penjelasan :

Untuk tahun 2026, realisasi persentase capaian kinerja program perangkat daerah sebesar 58,68 dan untuk tahun 2025 realisasi kinerja program sebesar 58,68

- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2026 dengan Target Akhir Renstra

Tabel. 26
Realisasi Indikator Sasaran IV Tahun 2026
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis IV	Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2026	Target akhir renstra tahun 2029
1.	Meningkatnya Akintabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	58,68	75,23

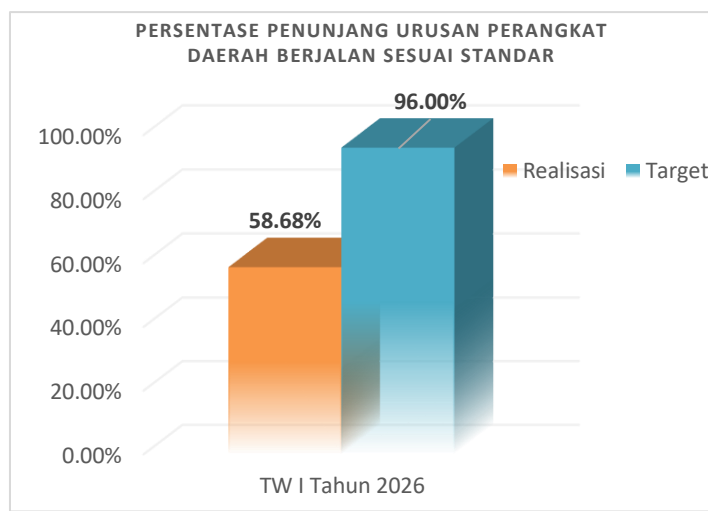
Penjelasan:

Dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2026 persentase realisasi kinerja program perangkat daerah sebesar 58,68, maka realisasi yang diperoleh di tahun 2026 masih perlu ditingkatkan agar mencapai target Renstra yang ditetapkan dengan nilai sebesar 75,23.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis IV yaitu :

▪ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran program adalah tersedianya jasa dan prasarana penunjang untuk pelayanan administrasi perkantoran. Indikator yang digunakan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar. Target yang ditetapkan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk Tahun 2026 adalah sebesar 96%, terealisasi sebesar 58,68% dengan capaian kinerja 81,74% dengan rincian kegiatan pendukung sebagai berikut :



Rincian kegiatan pendukung sebagai berikut :

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dengan indikator kinerja yaitu persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu. Tahun 2026, terealisasi 100% penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu dari target 100%. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu}}{\text{Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi}} \times 100\% \\
 & = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah tersedianya administrasi keuangan dengan baik dengan indikator kinerja yaitu persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik. Target yang ditetapkan pada tahun 2026 sebesar 100% dengan realisasi kegiatan sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% (**predikat kinerja sangat memuaskan**) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, indikator pencapaiannya yaitu Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Persentase administrasi keuangan yang terelenggara dengan baik}}{\text{Persentase laporan keuangan yang disusun}} \times 100\% \\
 & = \frac{100\%}{100} \times 100\% \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen barang milik daerah dengan indikator kinerja yaitu persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar. Pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ditargetkan pada Triwulan II. indikator pencapaiannya yaitu persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase BMD yang diadministrasikan} \\
 \hline
 \text{Persentase Target BMD yang telah} \\
 \text{diadministrasikan} \quad \times 100\% \\
 = \quad -\% \\
 \hline
 \quad -\% \quad \times 100\% \\
 = \quad -\%
 \end{array}$$

4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah tercapainya target pendapatan perangkat daerah dengan target kinerja pada Tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi terhadap target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. **(predikat kinerja sangat baik)**. Pada kegiatan Pelaporan Pengelolaan Restribusi Daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan PD dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase realisasi pendapatan obyek} \\
 \text{retribusi daerah} \\
 \hline
 \text{Persentase target realisasi pendapatan} \\
 \text{Daerah} \quad \times 100\% \\
 = \quad 100\% \\
 \hline
 \quad 100\% \quad \times 100\% \\
 = \quad 100\%
 \end{array}$$

5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah tertibnya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100%. Realisasi terhadap target sebesar 40% (capaian kinerja 40%). **Predikat kinerja kurang**. Indikator kinerja pencapaian yaitu persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah. Formula rumus yang digunakan untuk mengukur yaitu:

$$\frac{\text{Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian}}{\text{Persentase rata-rata target seluruh sub kegiatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{40\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 40\%$$

6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah tertibnya administrasi umum perangkat daerah. Target kinerja yang ditetapkan untuk kegiatan adalah sebesar 100% dengan realisasi 10% (capaian kinerja 10%). **Predikat kinerja sangat kurang.** Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{rata-rata realisasi kinerja administrasi umum perangkat daerah}}{\text{rata-rata target kinerja administrasi umum perangkat daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{10\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 10\%$$

7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran kegiatan adalah tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ditargetkan pada triwulan II tahun 2026. indikator pencapaiannya yaitu persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase realisasi pengadaan BMD}}{\text{Persentase rencana kebutuhan Pengadaan BMD}} \times 100\%$$

$$= \frac{- \%}{- \%} \times 100\%$$

$$= - \%$$

8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran kegiatan adalah persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah target kinerja untuk sebesar 100% dan realisasi sebesar 78,12% (capaian 78,12%). **Predikat kinerja sangat baik.** Pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{rata-rata realisasi kinerja penunjang} \\ & \text{urusan pemerintahan daerah}}{\text{rata-rata target kinerja penunjang urusan} \\ & \text{pemerintahan daerah}} \times 100\% \\ & = \frac{78,12\%}{100\%} \times 100\% \\ & = 78,12\% \end{aligned}$$

9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah. Target kinerja pada kegiatan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% (capaian kinerja 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Persentase BMD yang} \\ & \text{telah dipelihara dengan baik}}{\text{Persentase kebutuhan pemeliharaan BMD}} \times 100\% \\ & = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

No	Kegiatan	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Ket
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-%		
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40%	Kurang	
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10%	Sangat kurang	
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- %		
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78,12%	Sangat baik	
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
		528,12%		

Pencapaian indikator Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah keseluruhan Capaian kinerja kegiatan}}{\text{Jumlah seluruh Kegiatan}} \times 100\% \\
 & = \frac{528,12\%}{9} \times 100\% \\
 & = 58,68\%
 \end{aligned}$$

Secara umum pencapaian kinerja program, sebagai berikut :

No	PROGRAM	TARGET KINERJA TW I. TAHUN 2026	REALISASI KINERJA TW. I TAHUN 2026	% CAPAIAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	96%	58,68%	61,12%
RATA-RATA				61,12%

Sub Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis IV pada Tahun 2026:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu. Untuk sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah . Realisasi indikator sasaran sub kegiatan ini untuk Tahun 2026 sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen (persentase capaian 100%) **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Indikator dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dapat dihitung dengan formulasi :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu} &= \frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan disusun tepat waktu pada tahun (n)}}{\text{target}} \\ &= 1 \text{ dokumen} \end{aligned}$$

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	dokumen	1	1	100%	

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya dokumen RKA-SKPD, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu. Pencapaian kinerja ditargetkan di triwulan II dan

III. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dapat dihitung dengan formulasi :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah dokumen RKA-SKPD} &= \text{Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun} \\ \text{yang tepat waktu} &\quad \text{disusun tepat waktu pada tahun (n)} \\ &= - \text{Dokumen} \end{aligned}$$

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Koordinasi dan penyusunan RKA-SKP	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	dokumen	-	-	-	

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya dokumen DPA-SKPD, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu. Realisasi indikaor sasaran sub kegiatan ini untuk TW I tahun 2026 sebanyak 1 dokumen yaitu dokumen DPA Pokok tahun 2026 (persentase capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Indikator dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dapat dihitung dengan formulasi :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah dokumen DPA-SKPD} &= \text{Jumlah dokumen DPA-SKPD yang} \\ \text{disusun tepat waktu} &\quad \text{disusun tepat waktu pada tahun (n)} \\ &= 1 \text{ dokumen} \end{aligned}$$

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	dokumen	1	1	100%	

4. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya dokumen kinerja perangkat daerah yang dilengkapi dengan 1 (satu) indikator yaitu jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun Tahun 2024 yaitu sebanyak 3 dokumen, berupa dokumen Evaluasi Monev RKP

triwulan I Tahun 2026, LKPJ Tahun 2025, LPPD tahun 2025 dengan persentase capaian sebesar 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Indikator dari sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dapat dihitung dengan formulasi :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah dokumen evaluasi kinerja} &= \text{Jumlah laporan evaluasi kinerja} \\ \text{pelayanan perangkat daerah} &\quad \text{pelayanan perangkat daerah} \\ \text{yang disusun} &\quad \text{yang disusun pada triwulan (n)} \\ &= 2 \text{ laporan} \end{aligned}$$

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	laporan	2	2	100%	

5. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sasaran sub kegiatan adalah terbayarnya gaji dan tunjangan bagi ASN lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Tahun 2026 untuk sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah 40 orang. Dengan realisasi 40 orang (Capaian Kinerja adalah 100%). Indikator dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dapat dihitung dengan formulasi :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya} &= \text{Jumlah ASN yang gaji dan} \\ \text{terbayarkan} &\quad \text{tunjangan terbayarkan} \\ &\quad \text{Pada triwulan (n)} \\ &= 40 \text{ orang} \end{aligned}$$

Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	Orang	40	40	100%	

6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran. Tahun 2026 untuk sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD adalah 18 laporan. Realisasi kinerja sebanyak 7 laporan sehingga capaian kinerja adalah 100%. Indikator dari sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dapat dihitung dengan formulasi :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah dokumen laporan keuangan} &= \text{Jumlah dokumen laporan keuangan} \\ \text{bulanan/triwulanan/semesteran SKPD} &\text{ bulanan/triwulanan/semesteran} \\ \text{yang disusun} &\text{ SKPD yang disusun pada tahun} \\ &\text{(n)} \\ &= 7 \text{ dokumen} \end{aligned}$$

Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun	laporan	7	7	100 %	

7. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD. Realisasi kinerja telah tercapai sebanyak 0 laporan dengan pencapaian kinerja 0%. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	laporan	-	-	-%	

yang disusun					
--------------	--	--	--	--	--

8. Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan pengelolaan retribusi daerah. Tahun 2026 untuk sub kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah adalah 1 dokumen. Realisasi sebanyak 1 dokumen (Capaian Kinerja adalah 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	

9. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan data administrasi kepegawaian, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan, Realisasi indikator kinerja Tahun 2026 sebanyak 0 dokumen dari target 0 dokumen (persen capaian 100%). **Predikat kinerja sangat kurang.** Indikator dari sub kegiatan pendataan dan pengolahan data administrasi kepegawaian dapat dihitung dengan formulasi :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan} &= \text{Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan} \\ &= 0 \text{ dokumen} \end{aligned}$$

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	dokumen	3 dokumen	0 dokumen	0%	

10. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan TUSI. Sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan sebanyak 2 orang sedang realisasi ditahun 2026 sebanyak 2 orang atau persentase capaian diangka 100%

Indikator dari sub kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi dapat dihitung dengan formulasi :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah ASN yang lulus diklat} &= \text{jumlah ASN yang lulus diklat} \\ \text{berdasarkan tugas dan fungsi} &\quad \text{berdasarkan tugas dan fungsi} \\ &= 2 \text{ orang} \end{aligned}$$

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan TUSI	orang	2	2	100%	

11. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Realisasi indikator kinerja untuk tahun 2026 ditargetkan pada triwulan II, Capaian kinerja digambarkan pada tabel dibawah :

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	-	-	-%	

12. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Target Kinerja tahun 2026 untuk sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah 11 paket. Realisasi 11 paket sehingga capaian kinerja adalah 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	11	11	100%	

13. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Capaian kinerja sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk triwulan I tahun 2026 adalah 100%. Target untuk satu tahun adalah 4 paket, yang realisasi sebanyak 5 jenis. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	5	5	100%	

14. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sasaran kegiatan adalah tersedianya bahan logistik kantor. Target kinerja triwulan I tahun 2026 untuk sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor 20 paket sedangkan realisasi 1 paket. Sehingga capaian kinerja adalah 5% .

Predikat kinerja sangat kurang. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	20	1	5%	

15. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya bahan cetakan dan penggandaan. Target kinerja triwulan I tahun 2026 untuk sub kegiatan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan 1 paket sedangkan realisasi 1 paket. Sehingga Capaian Kinerja adalah 100 %. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1	1	100%	

16. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Target Kinerja triwulan I tahun 2026 sebanyak 15 dokumen untuk sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15 dokumen sedangkan realisasi 60 dokumen. Sehingga capaian kinerja adalah 100 %. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	15	15	100 %	

17. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sasaran sub kegiatan adalah terfasilitasinya tamu kantor. Capaian kinerja sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu triwulan Itahun 2026 adalah 50%. Target triwulan Itahun 2026 adalah 2 laporan. **Predikat kinerja cukup.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	2	1	50%	

18. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Capaian kinerja sub kegiatan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar 80%. Target triwulan Itahun 2026 adalah 75 laporan yang terealisasi di sebanyak 60 laporan. **Predikat kinerja memuaskan.**

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	75 laporan	60 laporan	80%	

19. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya dokumen penatausahaan arsip dinamis perangkat daerah. Triwulan ITahun 2026, terealisasi 0 dokumen arsip dinamis yang diadministrasikan dari target 50 dokumen. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat kurang.**

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	50	0	0%	

20. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Sasaran sub kegiatan adalah terpenuhinya mebel kantor. Target kinerja triwulan I tahun 2026 sesuai rencana aksi realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan II Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	-	-	-%	

21. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sasaran sub kegiatan adalah terpenuhinya peralatan kantor dan mesin lainnya. Target kinerja triwulan I tahun 2026 baru ditargetkan pada triwulan II sesuai dengan rencana aksi. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	-	-	-%	

22. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sasaran sub kegiatan adalah tertatanya surat masuk dan surat keluar. Target kinerja triwulan I tahun 2026 untuk sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah 375 laporan yang terealisasi 291 laporan atau dengan capaian 77,60%. **Predikat kinerja sangat baik.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	surat	375	291	77,60%	

23. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik air

Sasaran sub kegiatan adalah terpenuhinya jasa listrik dan air kantor. Target kinerja triwulan I tahun 2026 untuk sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah 4 laporan dengan realisasi kinerja sebanyak 4 laporan. Capaian kinerja sebesar 100%. **Predikat sangat memuaskan.** Capaian kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	KET	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	4	4	100%	

24. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor. Target Kinerja triwulan I tahun 2026 sebanyak 5 laporan dengan realisasi kinerja sebanyak 5 laporan. Capaian Kinerja sebesar 100%. Capaian kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	5	5	100%	

25. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional. Target Kinerja triwulan I tahun 2026 untuk sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan adalah 10 Unit yang terealisasi sebanyak 10 unit. Capaian kinerja 100%. **Predikat sangat memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	10	10	100%	

26. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sasaran sub kegiatan adalah terpeliharanya peralatan dan mesin kantor. Target Kinerja triwulan I tahun 2026 untuk sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya adalah 14 unit, yang terealisasi sebanyak 14 unit. Sehingga capaian kinerja adalah 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

:

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	14 unit	14 unit	100%	

27. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sasaran sub kegiatan adalah terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya. Target kinerja untuk sub kegiatan tersebut ditetapkan ditriwulan II sesuai dengan rencana aksi yang diperjanjikan sehingga capaian kinerja masih 0%. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	-	-	-0%	

4.4.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Terkait target kinerja untuk sub kegiatan Penyediaan Logistik Kantor sampai dengan akhir triwulan I tahun 2026 realisasi sebanyak 1 paket dari target 20 paket yang ditetapkan karena belanja melalui E-katalog belum siap digunakan.
- b. Pada Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan capaian kinerja sebesar 0%, karena alat dan bahannya dibelanja melalui e-katalog tapi sampai akhir triwulan I belanja lewat E-katalog belum bisa sehingga menunggu sampai triwulan II.

3.5 Realisasi Anggaran

Realisasi Keuangan pada Urusan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Permasa lahan	Solusi dan Rekomendasi Perbaikan
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= $\frac{4}{3} \times 100$	(6)	(7)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.326.341.890	1.235.751.160	19,53		
a	KEGIATAN PERENCANAAN PENGANGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	129.495.800	1.500.000	1,16		
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.756.200	1.500.000	3,43		
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.297.300	-	-		
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	3.360.000	-	-		
4.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.082.300	-	-		
b	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.031.270.491	1.152.493.641	22,91		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.932.085.091	1.146.831.641	23,25		
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	99.185.400	5.680.000	5,73		

c	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	45.065.900	800.000	1,78		
1.	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	45.065.900	800.000	1,78		
d	KEGIATAN ADMINISTASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	8.524.000	680.000	7,98		
1.	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8.524.000	680.000	7,98		
e	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	66.995.900	8.270.000	12,34		
1.	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	765.900	-	-		
2.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.920.000	8.270.000	34,57		
3.	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42.310.000	-	-		
f	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	376.575.800	47.572.724	12,63		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.095.000	-	-		
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.684.000	-	-		
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.262.300	200.000	1,78		

4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	7.650.000	-	-		
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.660.000	560.000	5,80		
6.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.050.000	450.000	5,59		
7.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	333.149.500	46.362.724	13,92		
8.	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.025.000	-	-		
g	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	374.127.998	-	-		
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	34.200.000	-	-		
2.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.727.999	-	-		
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	248.200.000	-	-		
h	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	162.910.000	20.684.795	12,70		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.357.200	-	-		
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	74.392.800	9.684.795	13,02		
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.160.000	11.000.000	13,72		
i	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK	133.376.000	3.750.000	2,81		

	DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Kendaraan Operasional Lapangan	63.950.000	-	-		
2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.520.000	3.750.000	18,27		
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.906.000	-	-		
II	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	29.825.220	-	-		
a	KEGIATAN PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.825.220	-	-		
1	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.825.220	-	-		
III	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	167.911.000	10.925.000	6,51		
a	KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTANNYA DLM DAERAH KAB/KOTA	167.911.000	10.925.000	6,51		
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses					

	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	167.911.00	10.925.000	6,51		
IV	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	84.684.250	-	-		
a	KEGIATAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YG WILAYAH KEANGGOTANNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KAB/KOTA	84.684.250	-	-		
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	84.684.250	-	-		
V	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.580.932.600	5.030.000	0,32		
a	KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.580.932.600	5.030.000	0,32		
1	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.580.932.600	5.030.000	0,32		
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	39.255.800	-	-		
a	KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.255.800	-	-		
1.	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai		-	-		

	Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrurisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	39.255.800				
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.512.360.400	49.873.000	3,30		
a	KEGIATAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITR AAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DGN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	1.512.360.400	49.873.000	3,30		
1.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	31.993.000	4.160.000	13,00		
2.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	783.406.200	44.363.000	5,66		
3.	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	32.169.000	-	-		
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	180.449.000	-	-		
5	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	56.534.000	1.350.000	2,39		
6	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	427.809.200	-	-		
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	228.719.200	-	-		

a	KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	228.719.200	-	-		
1.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	228.719.200	-	-		
IX	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	35.910.000	-	-		
a	KEGIATAN PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN	18.050.000	-	-		
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pemantauan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Distributor, Agen, Grosir/perkulakan dan Toko Swalayan Melalui sistem Perizinan Berusaha Melalui Sistem Elektronik	18.050.000	-	-		
b	KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.860.000	-	-		
1	Sub Kegiatan pemeriksaan penyimpanan Bahan Berbahaya	17.860.000	-	-		
X	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	20.935.046.000	67.120.000	0,32		
a	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	20.613.472.000	15.870.000	0,08		

1.	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	20.613.472.000	15.870.000	0,08		
b	KEGIATAN PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	321.572.000	51.250.000	15,94		
1.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	321.572.000	51.250.000	15,94		
XI	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	651.210.200	17.471.000	1,86		
a	KEGIATAN PENGENDALIAN HARGA DAN STOCK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KAB/KOTA	619.841.200	11.525.0007	1,86		
1.	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	89.383.200	8.230.000	9,21		
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	530.458.000	3.295.000	0,62		
b	KEGIATAN PENGAWASAN PUPUK DAN PASTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	31.369.000	5.946.000	18,96		
1.	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan					

	Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	31.369.000	5.946.000	18,96		
XII	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	294.445.500	-	-		
a	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	294.445.500	-	-		
1.	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	170.795.000	-	-		
2.	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	30.050.000	-	-		
3.	Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	67.334.000	-	-		
4	Peningkatan Citra Produk Produk Ekspor	26.266.500	-	-		
XIII	PROGRAM STANDARDINASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	204.919.113	1.820.000	0,89		
a	KEGIATAN PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG DAN PENGAWASAN	204.919.113	1.820.000	0,89		
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi, Legal Berupa Tera, Tera Ulang	123.645.000	1.820.000	1,47		
2	Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	81.274.113	-	-		
XIV	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.025.851.900	76.547.316	3,78		
a	KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.025.851.900	76.547.316	3,78		

	KABUPATEN/KOTA					
1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota	111.007.000	-	-		
2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	587.140.300	71.997.316	12,26		
3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.073.950.100	-	-		
4.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	253.754.500	4.550.000	1,79		
XV	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	65.183.000	690.000	1,06		
a	PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	65.183.000	690.000	1,06		
1	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	37.581.000	690.000	1,84		
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	27.602.000	-	-		

XVI	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	68.080.000	1.840.000	2,70		
a	KEGIATAN PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	68,080.000	1.840.000	2,70		
1.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	68.080.000	1.840.000	2,70		

BAB IV**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab. III Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tahun 2026, disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama dan akuntabilitas keuangan sesuai dengan renstra tahun 2025-2029, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan sektor usaha mikro, kecil dan menengah	- Persentase pertumbuhan omzet UMKM - Persentase koperasi sehat	11,707% 12%
2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	- Pertumbuhan omzet perdagangan - Pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	10% 5%
3	Meningkatnya pertumbuhan sektor Industri	- Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah	0,163%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	- Nilai AKIP	72,02

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, rata-rata nilai capaian indikator adalah 9,78%.

Akuntabilitas Keuangan

Dari 4 Sasaran Strategis tersebut yang telah didukung oleh 16 program dengan anggaran masing-masing program diperoleh data rata-rata penyerapan anggaran pada semua sasaran strategis adalah 4,28%.

B. Saran

Untuk mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, diharapkan :

- Adanya dukungan berupa kerjasama dan kolaborasi dari seluruh ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
- Perlunya antisipasi terhadap kondisi eksternal yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja opd.
- Peningkatan penyampaian informasi 1 (satu) data.
- Perlunya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keahlian ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan reformasi birokrasi lebih nyata perubahannya.

C. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Perbaikan-Perbaikan Tahun Lalu

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) pada triwulan I Tahun 2026 di tuangkan dalam matrix tindak lanjut sebagai berikut:

**Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
Triwulan I Tahun 2025**

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	Status/Progress Penyelesaian
1	Selaraskan Indikator Kinerja Kepala Bidang, Kasubid dalam PK dengan Indikator Kinerja dalam Rencana Aksi	Keselarasan indikator kinerja akan dilakukan perbandingan dan perbaikan	Telah melakukan perbaikan indikator kinerja agar selaras antara PK dengan SKP
2	Selaraskan Indikator kinerja Kepala Bidang., Kasubid, dalam PK dengan indikator kinerja dalam rencana aksi	Pada penyusunan PK dan rencana aksi dan SKP tidak selaras sehingga perlu ada perbaikan agar ada keselarasan	Telah memperbaiki keselarasan indikator kinerja kepala Bidang antara PK dan SKP
3	Publikasikan dokumen perencanaan dan laporan kinerja di website OPD/PPID	Setiap laporan kinerja OPD diharuskan untuk dipublikasikan di website OPD/PPID oleh admin	Telah diserahkan setiap laporan kepada admin PPID untuk dipublikasiakn.
4	Lakukan perbaikan terhadap pengukuran kinerja, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dijelaskan dengan jelas	Pada pengukuran kinerja aka dilakukan perbaikan agar dapat menjelaskan kondisi kerja yang jelas	Telah dikondisikan pada penyusunan renja dan renstra agar dapat tergambar kondisi kerja dengan lebih jelas.

5	Lakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan evaluasi internal	Setiap akhir triwulan dilakukan rapat internal guna perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan evaluasi internal	Lebih diintensifkan rapat internal guna agar menghasilkan perbaikan dan penyempurnaan laporan.
---	---	---	--

